

**AYAT-AYAT POLITIK  
DALAM WACANA TAFSIR KIAIYI-SANTRI  
(STUDI DI KOTA PALEMBANG)**

**John Supriyanto, M.A  
Dr. Muhammad Noupal, M.Ag**

<b>Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit</b>
Ketentuan Pidana Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</li> <li>2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).</li> </ol>

---

**Ayat-ayat politik Dalam wacana tafsir kiayi-santri**  
**(studi di kota Palembang)**

---

Penulis : John Supriyanto, M.A  
Dr. Muhammad Noupal, M.Ag  
Layout : Yuni Aprilia  
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:  
Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang  
Anggota IKAPI

Dicetak oleh:  
**CV. Amanah**  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp/Fax : 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I : November 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN :

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana wacana tafsir kiayi-santri yang ada di kota Palembang tentang ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran. Pemahaman kiayi-santri tersebut penting diungkap mengingat kedudukan mereka yang cukup istimewa di masyarakat. Dari kiayi-santri, biasanya informasi seputar putusan-putusan hukum agama, tidak terkecuali pandangan politik mereka turut mempengaruhi dinamika sosial dan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutic dan analisis wacana untuk melihat bagaimana wacana tafsir kiayi-santri tentang ayat-ayat politik. Dengan sampel para kiayi-santri yang diambil secara random dari berbagai pondok pesantren di kota Palembang didapati kesimpulan bahwa wacana tafsir mereka tentang ayat-ayat politik selalu bersifat kontekstual dan normative. Hal ini disebabkan karena kiayi-santri selalu melihat realitas politik di sekitarnya dan nilai-nilai ideal yang ada dalam al-Quran.

Kata kunci : *ayat-ayat politik, wacana tafsir, kiayi-santri, kontekstualisasi*

## ABSTRACT

This study examines how the discourse of interpretation from *kiayi-santri* in the city of Palembang about political verses in the Koran. It is very important to express the interpretation of the *kiayi-santri*, because of their quite special position in a society. From *kiayi-santri*, usually information about decisions of religious law, including their political views, also influences social and life dynamics in society. This research uses the hermeneutic method and the discourse analysis method to see how the discourse of interpretation from *kiayi-santri* about political verses in the Koran. With a sample of *kiayi-santri* randomly drawn from various boarding schools in the city of Palembang, it was concluded that their discourse of interpretation of political verses in the Koran, always characterized by contextual and normative. This is because the *kiayi-santri* always look at the political reality around them and the ideal values found in the Koran.

**Keynote :** *ayat-ayat politik, wacana tafsir, kiayi-santri, kontekstualisasi*

## ملخص

عن Palembang في kiayi-santri خطاب تفسير كيفية في الدراسة هذه تبحث إلى بالنظر kiayi-santri فهم عن الكشف المهم من القرآن في السياسية الآيات المعلومات تؤثر ما عادة ، kiayi-santri من المجتمع في الخاص وضعهم الديناميات على ، السياسية آرائهم سيما ولا ، الديني القانون بقرارات المتعلقة الخطاب وتحليل التأويلية الطريقة البحث هذا يستخدم الناس وحياة الاجتماعية من عينة مع السياسية الآيات عن سانترى-الكيائي خطاب يتحدث كيف لنرى مدينة في الداخلية المدارس مختلف من عشوائي بشكل اختيارهم تم kiayi-santri ذلك دائماً وسياسي سياق هو السياسية الآيات تفسير خطاب أن استنتج ، باليمبانج المثالية والقيم بهم المحيط السياسي الواقع إلى دائماً ينظر سانترى-الكيائي لأن القرآن في الموجودة

السياق ، سانترى-الكيائي ، التفسير خطاب ، السياسية الآيات :المفتاحية الكلمات

## **KATA PENGANTAR**

Bismillah, Alhamdulillah dan Sholawat kepada Nabi Muhammad penulis ucapkan karena penelitian ini selesai tepat waktu. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, langsung atau tidak langsung, yang membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas kondisi politik di Indonesia yang beberapa tahun ini mulai menunjukkan adanya pergolakan secara massif. Peran agama yang dimainkan oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan ulama atau kiayi; turut masuk ke dalam ranah politik sehingga mengakibatkan emosi massa. Kasus Habib Rizieq Shihab yang menjadi pelopor gerakan 212 ikut memanaskan kondisi politik dengan mengajak masyarakat menolak hasil pemilihan presiden. Akibatnya, banyak masyarakat Islam di Indonesia yang melihat hasil pemilihan presiden secara pesimistis.

Peran ulama dalam politik menurut penulis dikarenakan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Quran yang mengandung persoalan politik. Ayat-ayat tentang pemimpin yang adil, pemimpin non muslim dan bentuk keadilan social yang menjadi tugas pemimpin; difahami oleh ulama dengan pemahaman mereka sendiri dan kemudian ikut mempengaruhi pemahaman masyarakat. Akibatnya, ketika pemahaman ulama itu berubah menjadi sikap, maka masyarakat juga kembali terpengaruh.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pemahaman ulama (kiayi-santri) terhadap ayat-ayat politik. Dengan menggunakan metode hermenutik dan analisis wacana, penelitian ini menunjukkan hasil yang menarik untuk diketahui.

Palembang, Nopember 2019  
peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Landasan Teori .....	8
F. Kajian Pustaka .....	14
G. Metodologi Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>23</b>
A. Ayat-Ayat Politik Dalam Al-Quran .....	23
1. Inventarisasi Ayat-Ayat Politik Ayat .....	23
2. Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan.....	25
3. Ayat Tentang Musyawarah .....	30
4. Ayat-Ayat tentang Keadilan (al-‘adalah) dan persamaan (musawah) .....	37
5. Ayat Tentang Menunaikan Amanah .....	46



6. <i>Tentang</i> Amar Ma'ruf Nahi Munkar .....	48
7. <i>Ayat tentang Hukum Allah</i> .....	54
8. <i>ayat tentang Tanggung Jawab</i> .....	56
9. <i>Ayat tentang Kebebasan</i> .....	59
B. <i>Realitas Politik Indonesia; Suatu Fenomena</i> .....	61
1. <i>Kasus Ahok</i> .....	61
2. <i>Kasus Doa Neno Warisman</i> .....	65
3. <i>Politisasi Masjid</i> .....	73

<b>BAB III AYAT-AYAT POLITIK DALAM WACANA KIAI-SANTRI; SUATU NARASI DESKRIPTIF</b> .....	<b>75</b>
A. <i>Wacana Politik ; Narasi Umum</i> .....	75
B. <i>Kategorisasi Ayat Politik dalam Wacana Kiai-Santri</i> .....	103
1. <i>Hakikat Politik</i> .....	104
2. <i>Masalah Pemimpin dan Kepemimpinan</i> .....	105
3. <i>QS. Al-Maidah ayat 52 dan Pemimpin Non-Muslim</i> .....	107
4. <i>Musyawah dan Bebas Berpendapat</i> .....	108
5. <i>Negara yang Adil</i> .....	109
6. <i>Perselisihan Umat</i> .....	110
7. <i>Peran Negara dalam Perselisihan di Masyarakat</i> .....	112
8. <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> .....	113
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>115</b>
A. <i>Kesimpulan</i> .....	115
B. <i>Saran</i> .....	115



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tema pokok dalam penelitian ini akan mengarah kepada pemahaman para kiayi dan santri tentang ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang politik. Deskripsi pemahaman tersebut menjadi sangat penting mengingat kiayi-santri saat ini, khususnya di Indonesia, memiliki kedudukan yang cukup istimewa di masyarakat. Dari kiayi-santri, biasanya informasi seputar putusan-putusan hukum agama disampaikan kepada masyarakat. Bahkan dari mereka juga norma perilaku dan prinsip moral diterima dan dijalankan oleh masyarakat; tidak terkecuali pandangan-pandangan tentang politik yang turut mempengaruhi dinamika sosial dan kehidupan masyarakat.

Posisi sentral kiayi-santri dalam kehidupan politik masyarakat, dengan sangat jelas kita dapat temukan pada kasus Ahok yang dianggap telah melecehkan agama. Kasus Ahok, dengan segala persoalan politik yang ada di dalamnya, kemudian menjadi lawan politik bagi kiayi-santri yang mendasari interpretasinya atas teks-teks al-Quran sebagai pandangan dan gerakannya. Bahkan melalui kasus Ahok inilah, politik Islam Indonesia saat itu mengarah kepada munculnya ulama-ulama atau kiayi-santri yang turut aktif dalam membela Islam.

Memang, sekalipun keikutsertaan kiayi-santri dalam politik praktis saat itu lebih banyak dalam bentuk pewacanaan; atau setidaknya dalam bentuk respon atas persoalan politik yang ada, hal ini menunjukkan bahwa kiayi-santri saat itu memiliki sikap politik karena didorong atas interpretasi mereka terhadap ayat-ayat al-Quran. Hal ini juga yang mendorong kajian-kajian atas ayat-ayat politik, seperti QS. al-Maidah; 51-53, sering

disampaikan oleh kiayi-santri dalam dakwah dan pengajaran keagamaan mereka.

Menarik, kajian atas ayat-ayat politik yang dilakukan oleh kiayi-santri tidak mengarah pada satu pemahaman yang sama. Ada banyak tafsir—misalnya tentang QS. al-Maidah; 51—yang memuat kata ‘*awliya*’ yang diartikan bukan sebagai ‘pemimpin’ tetapi juga ‘kawan setia’.<sup>1</sup> Persoalan multi tafsir atas ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang politik inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra dari pandangan dan sikap politik para ulama atau kiayi. Kita dapat mencontohkan bagaimana Habib Rizieq yang berseberangan pandangannya dengan Buya Syafi’i Ma’arif; juga antara KH. Ishomuddin dengan Bachtiar Natsir. Bahkan di kalangan NU yang diwakili KH. Said Agil Siraj dengan Muhammadiyah melalui Amin Rais, perbedaan itu semakin memperlihatkan masing-masing perbedaan pandangan ulama atau kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik.

Memang, di dalam al-Qur’an kita tidak menemukan kata ‘politik’ (dalam bahasa Arab disebut *siyasah*) dari akar kata *sasa - yasusu*. Tetapi tentu saja bukan berarti al-Quran tidak berbicara tentang politik. Istilah yang digunakan Al-Qur’an tentang politik secara sepintas ternyata dapat kita temukan pada ayat-ayat tentang “*hukm*”; yang pada awalnya berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. Dari akar kata yang sama terbentuk pula kata ‘*hikmah*’ yang pada mulanya berarti “kendali”.

---

<sup>1</sup> Misalnya dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka, disebutkan bahwa awliya berarti tolong menolong, bantu membantu dan pimpin memimpin dalam kekafiran orang yahudi dan nasrani. Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar* vol. 3 hal. 32. Ibn Katsir juga mengartikan awliya sebagai kawan, lihat Muhammad Saed Abdurrahman; *Tafsir Ibn Katsir Part 6 of 30* (al-Nisa 148 to al-Maidah 081), h. 140.

Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasat*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.<sup>2</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata ‘politik’ diartikan sebagai “segala urusan dan tindakan (kebajikan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain.” Juga dalam arti “kebajikan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah).”<sup>3</sup> Secara etimologis, kata "politik" juga masih berhubungan dengan [polisi](#) atau [kebijakan](#). Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan (1) menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan (*politics*). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik; (2) menunjuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (*policy*). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan; dan 3) menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (*siyasah*). Di antara ketiga definisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan

---

<sup>2</sup> Dalam kamus al-Muhith, *saya-yasusu* pada kalimat “*sasa al-dawwaba*”, berarti mengurus, melatih atau mendidik. Pengertian ini menunjukkan bahwa arti kata “*siyasah*” (politik) berimplikasi pada usaha untuk memberikan perhatian kepada masyarakat.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Mizan: Bandung, 1996), hal: 416

ketiga. Hal ini disebabkan orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan apapun entah baik entah buruk, dapat menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan terhadap masyarakat, dimana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset strategis.

Pengertian politik dalam fiqih Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekati pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari'at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari'at.<sup>4</sup>

Harus kita akui bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang tak terlepas dari kepentingan politik. Politik, sebagaimana yang diutarakan oleh Aristoteles adalah suatu cara yang bertujuan untuk mengantarkan manusia mendapat taraf hidup yang lebih baik.<sup>5</sup> Pernyataan sederhana Aristoteles ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang memandang politik sebagai upaya untuk memperbaiki rakyat dengan mengarahkan mereka kepada jalan selamat di kehidupan dunia maupun akhirat.

---

<sup>4</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (LKIS, Yogyakarta, cet I 1994), hal. 209-210

<sup>5</sup> Aristoteles mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari pada kepentingan swasta. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. Lihat : <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>. Diakses tanggal 23 Juli 2017.

Fungsi politik dalam Islam bukanlah segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan, tetapi bagaimana mengatur segala urusan rakyat dengan menyeluruh dan tuntas. Untuk mencapai itu semua, berbagai penjelasan di dalam Al-Qur'an harus diakui telah mengarahkan masalah politik dapat berfungsi secara maksimal. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat dilihat QS. An-Nisa yang mengatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak lain adalah amanah dari Allah; seperti firman-Nya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (An-Nisa: 58)*

Di dalam ayat ini Allah Swt telah mendiktekan kepada para pemimpin yang dipercaya memegang kekuasaan untuk berlaku amanah terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Sebab para pemimpin yang telah diberi tanggung jawab untuk memimpin rakyatnya, memiliki kewajiban untuk membawa rakyatnya menuju jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi, disebutkan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan amanat yang telah dibebankan kepadanya dengan tidak melakukan kezaliman, adil dalam menegakan hukum, serta cerdas dalam mengelola keuangan Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Ar-Risalah, 2006), jilid 6, hal. 424

Bahkan lebih jauh, Al-Qurthubiy juga mengatakan bahwa untuk menjalankan amanat merupakan inti dari setiap aturan-aturan yang harus dijalani. Itu artinya, betapa fundamental aspek amanat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Al-Quran juga mengenalkan prinsip musyawarah sebagai prinsip yang sangat erat dengan sejarah politik di dunia Islam. Hal itu dapat terlihat dari pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat.<sup>7</sup> Itu pula yang dilakukan ketika pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu bakar, begitu pula khalifah-khalifah setelahnya. Melalui musyawarah ini, potensi hegemoni dari pihak kuat terhadap pihak yang lemah menjadi tereliminir. Prinsip musyawarah sendiri dalam Al-Qur'an tercantum jelas dalam surat Ali Imran ayat 159 yaitu :

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali Imran: 159)*

Bahkan dalam masalah keadilan social, dijelaskan al-Quran sebagai suatu yang harus diterapkan kepada siapa saja, tak mengenal ras, suku,

---

<sup>7</sup> Lihat : Muhammad Rahmatullah, “Kepemimpinan Khalifah Abubakar al-Shiddiq”, dalam *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, vol. 4 No. 2 September 2014, hal. 197-204.



maupun agama untuk menegakkan keadilan tersebut. Di dalam Al-Qur'an, konsep keadilan ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah: 8)*

Pesan-pesan politik yang ditampilkan al-Quran ternyata tidak hanya berbicara tentang siapa yang menjadi pemimpin, tetapi juga bagaimana cara memimpin yang baik. Pendek kata, isu-isu politik yang ditampilkan al-Quran lebih berbicara kepada arti kata sesungguhnya dari *siyash* (mengatur) dari pada berkuasa.

Pesan-pesan seperti inilah yang akan diungkapkan melalui pemahaman para kiayi dan santri, khususnya tentang persoalan-persoalan politik yang terjadi di Indonesia. Secara idealis, deskripsi para kiayi-santri tentang tafsir ayat-ayat politik setidaknya dapat menjadi semacam filter dari kekeliruan dalam memahami ayat-ayat al-Quran yang multi tafsir yang nantinya malah dapat menimbulkan kesalahan dan kekeliruan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pokok persoalan yang telah diungkap, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ayat-ayat politik yang terdapat dalam al-Quran ?
2. Bagaimana ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran dapat difahami dari wacana tafsir kiayi-santri?
3. Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam wacana kiayi-santri tentang ayat-ayat politik yang ada dalam al-Quran ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana masalah politik dibicarakan dalam al-Quran.
2. Untuk mengetahui bagaimana ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran dapat difahami dari wacana tafsir kiayi-santri.
3. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam wacana kiayi-santri tentang ayat-ayat politik yang ada dalam al-Quran.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperkaya khazanah penelitian al-Quran dan kaitannya dengan ilmu social.
2. Sebagai upaya untuk menjelaskan secara ilmiah tentang wacana tafsir para kiai dan santri tentang masalah politik yang ada dalam al-Quran terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai keadilan yang dikehendaki oleh al-Quran.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pemikiran bahwa para kiayi-santri seharusnya mampu memahami ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang politik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh al-Quran itu sendiri.

## **E. Landasan Teori**

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai sebuah landasan teoritik dalam memahami tema pokok penelitian ini. Karena kajian ini ingin melihat bagaimana ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran difahami oleh para kiayi dan santri, maka untuk mendapatkan jawaban tersebut diperlukan semacam kerangka umum yang menjadi landasan teoritis.

### *Hermeneutika al-Quran*

Hermeneutika, (*hermeneune* dan *hermenia*) berarti “menafsirkan” dan “penafsiran”. Menurut Nashr Hamid Abu Zayd, Hermeneutika adalah istilah yang digunakan oleh berbagai kelompok studi teologis untuk menyebut sejumlah kaidah dan aturan-aturan standar yang harus diikuti oleh seorang penafsir untuk dapat memahami teks keagamaan (kitab suci). Dalam pengertian ini hermeneutik berbeda pengertiannya dengan tafsir (*exegesis*, ingg). Jika *exegesis* adalah tafsir itu sendiri dengan berbagai rinciannya yang praktis, maka hermeneutik lebih condong pada teori penafsirannya.

Peran hermeneutika dalam menafsirkan berbagai kajian keilmuan khususnya kitab suci memang sangat besar. Sebagai alternatif baru dalam metodologi dalam mengkaji kitab suci, keberadaan Hermeneutika tidak bisa dihindarkan dari dunia kitab suci Al-Qur’an. Bahkan ilmu tafsir kontemporer yang menawarkan hermeneutika yang muncul sebagai variabel metode pemahaman Al-qur’an menunjukkan bahwa daya tarik hermeneutika amat luar biasa. Hasan hanafi—sebagaimana dikutip Fahrudin Faiz—menyatakan hermeneutik tidak sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia.

Sebagaimana prosedur kerja hermeneutika yang meliputi proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah teks selalu mengasumsikan adanya tiga subjek yang terlibat, yaitu: dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Persoalan menjadi rumit ketika jarak waktu, tempat dan kebudayaan antara pembaca dan pengarang dan teks demikian jauh. Teks-teks keagamaan yang lahir dari sekian abad yang lalu di dunia Timur Tengah, ketika hadir di masyarakat Indonesia kini tentu saja merupakan sesuatu yang asing. Persoalan keterasingan inilah yang menjadi persoalan hermeneutika sebagai sebuah teori interpretasi. Peran hermeneutik ialah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau teks yang asing sama sekali agar menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.

Ketika teks Al-Qur'an dipahami secara terpisah dari konteks sosial-historisnya, banyak aspek dari wacana sosial-psikologisnya yang hilang. Dengan mengabadikan Al-Qur'an dalam bentuk tulisan yang baku, banyak nuansa dan variabelnya yang hilang. Namun, keuntungannya, Al-Qur'an lebih mudah untuk menjumpai pembacanya yang hidup di zaman dan tempat berbeda. Perlu disadari, ketika sebuah wacana yang begitu kompleks dituliskan, penyempitan dan pengeringan makna dan nuansa tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, disinilah urgensi hermeneutika sebagai metodologi penafsiran yang dihadirkan dalam mendekati Al-Qur'an. Tidak berarti kita mencari kelemahan dan kemudian membuktikannya, sehingga kitab suci itu gugur dan lemah, melainkan justru untuk menguji kesahihan dan muatan dan transmisi makna dari zaman ke zaman.

## *Analisis Wacana*

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam suatu komunikasi; atau telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) suatu bahasa. Melalui analisis wacana, kita tidak hanya mengetahui isi teks yang terdapat pada suatu wacana, tetapi juga mengetahui pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan-pesan itu tersusun, dan dipahami. Analisis Wacana akan memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi di belakang sebuah teks atau di belakang pilihan metode penelitian tertentu untuk menafsirkan teks.

Objek kajian atau penelitian analisis wacana pada umumnya berpusat pada bahasa yang digunakan sehari-hari, baik yang berupa teks maupun lisan. Jadi objek kajian atau penelitian analisis wacana adalah unit bahasa diatas kalimat atau ujaran yang memiliki kesatuan dan konteks yang eksis dikehidupan sehari-hari, misalnya naskah pidato, rekaman percakapan yang telah dinaskahkan, percakapan langsung, catatan rapat, dan sebagainya, dan pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang terdapat dalam teks. Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran (utterances) yang membentuk wacana.

Ada tiga paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa yaitu Pandangan positivisme-empiris; pandangan konstruktivisme, dan pandangan kritis. Dalam aliran positivisme-empiris, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek yang ada di luar dirinya. Pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala aatau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu ciri dari pemikiran ini adalah pemisahan

antara ide / pemikiran dan realitas. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan seemantik. Oleh karena itu, kebenaran sintaksis (tata bahasa) adalah bidang utama dari aliran positivisme tentang wacana. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, titik perhatian utama aliran positivisme didasarkan pada benar tidaknya bahasa itu secara gramatikal. Istilah yang sering disebut adalah kohesi dan koherensi. Wacana yang baik selalu mengandung kohesi dan koherensi di dalamnya. Kohesi merupakan keserasian hubungan antar unsur-unsur dalam wacana, sedangkan koherensi merupakan kepaduan wacana sehingga membawa ide tertentu yang dipahami oleh khalayak.

Dalam pandangan konstruktivisme—yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi—menolak pandangan positivisme/ empirisme dalam analisis wacana yang memisahkan subyek dan objek bahasa. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap bahwa subjek adalah faktor utama atau faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Bahasa yang dipahami dalam paradigma ini diatur dan dihidupkan dalam pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis yang membongkar makna dan maksud-

maksud tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang memngemukakan suatu pernyataan. pengungkapan itu dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara.

Sedangkan dalam pandangan kritis, ingin mengoreksi pandangan pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun secara institusional. Analisis wacana dalam paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikiran-pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang adal dalam masyarakat. Bahasa disini tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri si pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setup proses bahasa seperti, batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena memakai perspektif kritis, (paradigma) analisis wacana yang ketiga ini sering juga disebut Critical Discourse Analysis/CDA.

## **F. Kajian Pustaka**

Sekalipun tidak penulis temukan kajian khusus tentang wacana tafsir kiayi-santri tentang ayat-ayat politik yang ada dalam al-Quran, setidaknya ada beberapa tulisan yang sempat penulis telusuri, khususnya tentang ayat-ayat politik yang difahami oleh para ulama. Beberapa karya tulis dibuat dalam bentuk buku, jurnal penelitian bahkan karya ilmiah seperti tesis atau disertasi.

Mengawali kajian pustaka tentang ayat-ayat politik, Syu'bah Asa pernah menulis sebuah buku yang berjudul "*Dalam Cahaya al-Quran Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*" yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2000. Tulisan ini memang tidak membahas wacana tafsir kiayi-santri tentang ayat-ayat politik, tetapi hanya membahas secara detail bagaimana interpretasi tentang ayat-ayat social dan politik.

Selain itu juga ada banyak tulisan dalam bentuk jurnal hasil penelitian misalnya yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati dari Universitas Gajah Mada dengan judul "*Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama*". Tulisan ini sekalipun tidak melihat bagaimana wacana tafsir kiayi-santri tentang ayat-ayat politik, tetapi mencoba melihat relasi kuasa antara ulama dan pesantren dalam dinamika politik yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dengan demikian, tulisan ini tidak membahas sebagaimana yang menjadi pokok dalam penelitian yang penulis lakukan.

Kajian tentang politik Islam yang ada dalam al-Quran juga dibahas dalam sebuah jurnal yang bernama Jurnal Aqlam yang diterbitkan tahun 2016. Dengan judul tulisan "*Politik Islam Dalam Al-Qur'an ; Tafsir Siyashah Surat Ali Imran Ayat 159*", Delmus Puneri Salim, dosen dari IAIN Manado; melihat bagaimana al-Quran memiliki pandangan-pandangan politik



sebagaimana dalam QS. Al-Imran ayat 159. Tulisan ini juga tidak membahas pandangan-pandangan ulama terkini tentang ayat-ayat politik yang ada secara luas dari al-Quran.

Begitu juga tulisan dari Jazilatun NI'mah yang dibuat tahun 1999 dengan judul "*Konsep Politik Dalam Al-Qur'an*". *Sekalipun dibuat dalam bentuk skripsi dari UIN Sunan Ampel Surabaya*, ia mengatakan bahwa al Qur'an mengisyaratkan secara rinci prinsip-prinsip dan cara-cara yang di jadikan pegangan untuk menjalankan kekuasaan public; seperti perintah menunaikan amanat, perintah menetapkan hukum dengan adil, perintah ketaatan, perintah kembali kepada al Qur'an dan hadits, tentang agama.

## **G. Metodologi Penelitian**

### *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Palembang, tepatnya di beberapa majelis taklim dan pondok pesantren yang menjadi pusat keberadaan kiayi dan santri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan objek kajiannya adalah para kiayi dan santri. Penelitian ini akan dilakukan selama enam bulan efektif sampai pelaporan hasil penelitian.

### *Metode Penelitian*

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih ditekankan pada studi kasus; yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa yang aktual (*real-life events*) dan sedang

berlangsung.<sup>8</sup>

Objek yang diteliti dalam penelitian Studi Kasus hanya mencitrakan dirinya sendiri secara mendalam/detail/lengkap untuk memperoleh gambaran yang utuh dari objek (wholeness) dalam artian bahwa data yang dikumpulkan dalam studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan, utuh yang terintegrasi.

Karena penelitian Studi Kasus bersifat eksploratif maka sifat objek kajian yang sangat khusus menjadi bahan pertimbangan utama peneliti untuk mengelaborasinya dengan cara mengeksplorasi secara mendalam. Peneliti tidak hanya memahami kasus dari luarnya saja, tetapi juga dari dalam sebagai entitas yang utuh dan detail. Dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara mendalam untuk memahami lebih jauh tentang subjek, peneliti juga dapat memperoleh data melalui riwayat hidupnya.

Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus juga meliputi studi dokumentasi yang berdasarkan dari literatur-literatur yang ada. Kemudian dengan survei lapangan melakukan wawancara terhadap kiayi-santri untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan dan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat politik yang ada dalam al-Qurann. Secara teknis, untuk memudahkan penelitian, maka dilakukan pertimbangan penentuan sumber-sumber data dengan tujuan tertentu.

Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif dalam konteks kajian sosial yang kualitatif, disebutkannya bahwa *“pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yang dapat berupa*

---

<sup>8</sup> Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Pascasarjana 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/80816930.pdf>; Diakses Pada 14/9/2018.

*lembaga pendidikan tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Pertimbangan penentuan sumber data pada orang-orang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu”.*<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat ini, maka penentuan sumber data sebagai informan penelitian ini sudah sangat jelas yakni para kiayi dan santri yang ada di kota Palembang.

Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk menjabarkan atau mengidentifikasi pandangan kiayi dan santri tentang ayat-ayat politik. Data yang akan digunakan diperoleh dari situasi apa adanya tanpa adanya intervensi dari pihak peneliti. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan memasuki situasi lapangan. Data tersebut dideskripsikan dalam bentuk laporan untuk dianalisis lebih lanjut.

Peneliti percaya bahwa penelitian kualitatif sangat peduli (*concern*) kepada pemahaman terhadap berbagai gejala sosial. Gejala sosial adalah suatu peristiwa atau pola-pola tindakan interaksi manusia. Sifat dari dunia sosial itu adalah sifat dari interaksi manusia dalam masyarakat. Peristiwa atau tindakan yang dilakukan manusia itu adalah bermakna bagi pelakunya, karena itu, esensi dari tingkah laku manusia adalah bahwa tingkah lakunya itu mempunyai makna.

### *Populasi dan Sampel Penelitian*

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu,

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2013), h. 299

tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar. Penarikan sampel tersebut dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Yaitu terdiri atas responden umum dan informan baik formal maupun informal.

Adapun informan dan responden dalam penelitian ini adalah para kiayi dan santri yang ada di kota Palembang yang diambil dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mencari informasi yang lebih beragam.

#### *Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini dilakukan dengan tiga kegiatan yakni, studi dokumentasi, wawancara dan observasi non-partisipasi. Dengan teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan diperoleh informasi yang utuh dan mendalam dalam proses penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif holistik ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Metode observasi* digunakan untuk mengamati gejala dan suasana serta nuansa umumnya di kalangan kiayi-santri di kota Palembang. Dengan observasi ini diharapkan dapat memahami lokasi penelitian dan *setting* sosial yang ada di lokasi penelitian.
- 2) *Wawancara*. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan dengan obyek penelitian secara mendalam terhadap subyek penelitian untuk memperoleh berbagai data umum dan khusus serta spesifik mengenai pandangan, pemikiran dan pemahaman mereka tentang ayat-ayat politik.
- 3) *Metode dokumentasi* digunakan untuk mendapatkan data yang tersimpan dalam dokumen, baik yang berbentuk tulisan ataupun gambar peristiwa yang berhubungan dengan wacana politik.

## *Analisis Data*

Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif; yaitu serangkaian observasi yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan rumus melainkan dengan kata-kata dan kalimat menurut data pengambilan kesimpulan.<sup>10</sup> Data yang dikumpulkan kemudian dikelola melalui tiga tahapan, yaitu pengklasifikasian, pengkodean, dan tabulasi. *Pengklasifikasian* data, yaitu menggolongkan aneka-aneka ragam jawaban itu ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas.<sup>11</sup> *Pengklasifikasian* perangkat kategori itu penyusunannya harus memenuhi bahwa setiap perangkat kategori dibuat dengan mendasarkan kriteria yang tunggal, bahwa setiap perangkat satupun jawaban responden yang tidak mendapat tempat, dan kategori yang satu dengan yang lain harus terpisah secara jelas tidak saling tumpang tindih. *Koding*, yaitu usaha mengklasifikasian jawaban-jawaban responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu. Kemudian *tabulasi*, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data yang akan menjurus ke analisis distribusi data yang diperoleh untuk kemudian di analisa berdasarkan pemilahan tabulasi.

Penelitian ini juga menggunakan analisis data model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang saling berkaitan yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>12</sup> Lebih jelasnya analisis data dilakukan dengan prosedur berikut: *Pertama*, reduksi data yakni berusaha merangkum, mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan fokus pada tema penelitian. *Kedua*, *display* data,

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 13

<sup>11</sup> Margono S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010)

<sup>12</sup> Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (Sage Publication, Inc. London, 1984)

yakni berusaha mengorganisasikan dan memaparkan secara keseluruhan guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh. *Ketiga*, menyimpulkan dan verifikasi yakni melakukan interpretasi data dan melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna pengambilan kesimpulan yang tepat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan diarahkan pada pembahasan yang disusun dalam beberapa bab atau bagian.

Pada bab I yaitu Bab Pendahuluan akan dibahas latar belakang masalah yang memuat fenomena dan data awal terkait dengan tema penelitian. Lalu akan diuraikan juga masalah pokok dan perumusan masalah dengan mengikutkan tujuan penelitian. Hal penting lain adalah kajian pustaka, yaitu deskripsi tentang karya ilmiah yang sudah dilakukan terkait dengan tema pembahasan. Kemudian akan dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II yaitu Bab Landasan Teori, akan dikemukakan dua hal utama yaitu bagaimana al-Quran berbicara tentang masalah politik; dan bagaimana fenomena serta kondisi social politik yang terjadi di Indonesia selama ini.

Pada bab III atau Bab Pembahasan, akan diuraikan pembahasan tentang bagaimana wacana kiayi-santri dalam melihat ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran. Pada bab ini juga akan dibahas analisis pada aspek apa saja wacana tafsir kiayi-santri tentang ayat-ayat politik dan bagaimana mereka membuat interpretasi dan tafsirannya.

Pada bab IV atau Bab Analisis, akan dilakukan semacam kajian korelasi dari data dan fenomena yang didapat. Dengan mendeskripsikan bagaimana pandangan para kiayi-santri tentang ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran, kita akan dapat melihat adanya benang merah dari wacana tafsir yang berkembang dari para kiayi-santri tentang ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran.

Pada bab V atau Bab Kesimpulan, akan dipaparkan hal-hal penting terkait kesimpulan penulis terhadap masalah yang diteliti. Juga akan diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ayat-Ayat Politik Dalam Al-Quran**

Sub bab ini dimaksudkan untuk menguraikan bagaimana al-Quran berbicara tentang politik melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imam, ulil amri* atau *khalifah*); demokrasi (*syura*); keadilan social (*al-'adalah*); *amar ma'ruf nahi munkar*; kesamaan (*al-musawah*); tanggung jawab (*mas`uliyah*); kebebasan (*al-hurriyah*) dan beberapa ayat yang terkait dengan arti politik secara umum. Deskripsi sub bab ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sejak awal bagaimana masalah yang ada di dalam “politik” dapat kita buktikan melalui ayat-ayat al-Quran.

Oleh karena itu, deskripsi ayat-ayat politik ini akan diuraikan melalui beberapa cara; diawali dengan inventarisasi ayat-ayat politik dan interpretasi melalui penafsiran para ulama, dan analisis secara hermeneutic terhadap beberapa ayat yang berkaitan dengan pokok masalah. Kajian sub bab ini akan menghasilkan sebuah gambaran awal yang akan digunakan untuk memahami bagaimana ayat-ayat politik dapat difahami oleh para kiayi-santri.

#### **1. Inventarisasi Ayat-Ayat Politik**

Ayat-ayat politik yang akan diinventarisasi dalam sub bab ini dikaitkan dengan materi pokok yang ada dalam istilah politik. Sebagai ilmu yang berkaitan dengan masyarakat dan negara, politik mencoba untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat melalui kebijakan, aturan dan ketentuan yang dibuat oleh negara. Hal ini sesuai dengan pandangan Deliar Noer yang menyebutkan bahwa politik adalah seluruh

aktifitas yang berhubungan dengan kekuasaan dengan maksud untuk mempengaruhi baik dengan cara mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat”.<sup>13</sup> Selain itu juga, istilah politik (*siyasah*) yang secara umum berarti “mengatur”, juga diarahkan untuk memahami bagaimana melalui politik, dapat diwujudkan masalah masyarakat. Dalam pandangan ulama mazhab Hanbali, politik adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekati pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, arti politik adalah mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari’at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari’at.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas, inventarisasi ayat-ayat politik dalam al-Quran akan dideskripsikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam arti politik. Dengan kata lain, ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana al-Quran berbicara tentang keteraturan masyarakat, kekuasaan yang ada dalam susunan masyarakat, serta kemaslahatan yang ingin dicapai bagi masyarakat akan diinventarisasi sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Quran itu sendiri. Setidaknya ayat-ayat yang berhubungan dengan kepemimpinan, pengaturan dan pencegahan (*amar ma’ruf* dan *nahi munkar*), keadilan dan persamaan, musyawarah mengambil keputusan dan lain-lain akan diuraikan secara deskriptif.

---

<sup>13</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali, hal. 6.

<sup>14</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (LKIS, Yogyakarta. cet I 1994), hal. 209-210

## 2. Ayat Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan

Ayat-ayat tentang kepemimpinan dalam al-Quran biasanya dideskripsikan melalui beberapa kata seperti *imam*, *khalifah*, *ulul-amri* atau *wali*. Secara sinonim, istilah-istilah tersebut merujuk kepada makna pemimpin atau penguasa; yang secara politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan.

Kata *imam* dalam al-Quran dibicarakan sebanyak 12 kali baik dalam bentuk single atau plural (jamak).<sup>15</sup> Dalam QS. Al-Hijr: 79, al-Quran mengartikan *imam* sebagai “jalan umum”; dalam QS. Yasin; 12, sebagai “kitab induk atau *lauhil mahfuz*”; dalam QS. al-Isra’: 71, QS. al-Tawbah: 12, QS. al-Anbiya’: 73, QS. al-Qasas: 5 dan 41, dan QS. al-Sajadah: 24; semuanya mengartikan imam sebagai “pemimpin yang diikuti oleh masyarakat”.<sup>16</sup>

Kata *khalifah* dalam al-Quran hanya disebutkan sebanyak 2 kali; yaitu pada Qs. Al-Baqarah ayat 30 bahwa “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...*”. Juga pada (QS. 38; 26) bahwa Allah berkata, “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi...*”. Pada ayat pertama, konteksnya juga berlaku kepada semua manusia. Sedangkan pada ayat kedua, konteksnya adalah Nabi Daud yang diberikan amanah oleh Allah sebagai penguasa untuk membuat keputusan yang adil. Dari dua ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa kata *khalifah* tidak berarti sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abd al-baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim, (Kairo, Dar al-Hadis, 1996), hal. 99.

<sup>16</sup> Lihat : Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Madinah; Mujamma’ Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thaba’ah al-Mushaf al-Syarif, 1412H).

Di samping itu, kata *ulil amri* dalam al-Quran juga disebutkan sebanyak dua kali; yaitu QS. Al-Nisa; 59 dan 83. *Ulil Amri* secara sederhana berarti orang yang memiliki otoritas dalam urusan masyarakat. Menurut Muhammad Abduh, *ulil amri* adalah mereka yang disebut pemerintah (*umara'*), para hakim, para ulama, para pemimpin militer dan semua penguasa atau pemimpin yang menjadi rujukan masyarakat dalam kehidupannya.

Sementara itu, kata *wali* atau *awliya* disebut al-Quran sebanyak 33 kali dengan berbagai macam konteksnya. Secara sederhana, *awliya* diartikan sebagai orang kepercayaan; orang yang khusus atau dekat. Dalam al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, kata *awliya* dalam QS. Al-Maidah 57 diartikan dengan “pemimpin”; atau dalam QS. Al-Maidah 51 diartikan sebagai “teman setia”.

#### 1. QS. Al-Baqarah; 124 :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

Artinya :

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Dalam tafsir karya Thabathabai, jabatan *imam* seperti dalam ayat ini berasal dari anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sebagai ulama yang bermazhab Syiah, Thabatabai mengatakan bahwa sbagai jabatan tertinggi yang diperoleh manusia, seorang imam harus memiliki sifat yang terjaga dari dosa (ma'sum). Dalam tafsir Ibn Kasir dsiebutkan bahwa menurut Ibnu Khuwaiz Mindad al-Maliki: “Orang yang zhalim tidak patut menjadi khalifah, hakim, mufti (pemberi fatwa), saksi, dan tidak juga perawi hadits.” Begitu pentingnya jabatan *imam*, Allah sendiri mengatakan bahwa seorang imam tidak boleh dipegang oleh orang-orang yang zalim.

## 2. QS.an-Niaa’: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwa orang yang beriman itu harus taat kepada Allah, rasul dan *ulil amri*. Ketaatan kepada ulil amri, menurut al-Thabari ditujukan kepada para *umara'* (pemerintah)

karena adanya hadis Nabi yang mendukungnya selama mereka taat kepada Allah dan memberikan kemaslahatan umat.<sup>17</sup> Dalam pandangan Ibn Katsir, justru ayat ini bersifat umum; jadi bukan saja ditujukan kepada umara tetapi juga para ulama.<sup>18</sup> Dengan demikian, konsep ulil amri pada ayat ini ditujukan secara luas; baik kepada pemerintah atau ulama yang mengurus masalah masyarakat.

### 3. QS. al-Ma'idah: 57 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.

Menurut Ibn Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman tidak boleh menjadikan orang ahli kitab atau orang kafir sebagai wali atau teman; padahal mereka sering menjadikan Islam sebagai bahan ejekan dan permainan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Al-Thabari, *Jamiul Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran* (Beirut, Dar al-Fikr, 1988) juz. 8, hal. 496-501.

<sup>18</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim* (Riyadh, Dar al-'Alam al-Kutub, 2004), jilid 4, hal. 59.

<sup>19</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>.  
Diakses tanggal 16 Septmber 2019.

#### 4. QS. At-Taubah:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berbeda dengan ayat di atas, orang beriman juga dianjurkan untuk saling mendukung dan membantu dalam amar ma'ruf nahi munkar; sesuai dengan hadis bahwa orang mukmin itu seperti bangunan yang saling menguatkan.<sup>20</sup>

#### 5. QS. An-Nisaa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

---

<sup>20</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>.

Diakses tanggal 16 Septmber 2019.

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Menurut Sufyan al-Tsauri, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Katsir, amanat tersebut adalah menyangkut hal-hal yang bersifat umum dan wajib ditunaikan. Bukan saja oleh orang yang beriman tetapi juga oleh orang yang bertakwa. Bahkan ibn Katsir sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud amanat itu adalah hak-hak Allah atas hamba-Nya; seperti shalat, puasa, kifar, atau semua jenis nazar; juga hak atas hamba Allah seperti titipan dan lain-lain. Orang yang tidak melaksanakan amanat ini maka ia akan dituntut dan dihukum pada hari kiamat.<sup>21</sup>

### 3. Ayat Tentang Musyawarah

Ayat al-Quran yang berkaitan dengan politik juga diuraikan melalui ayat-ayat tentang konsep musyawarah (*syura*). Secara kamus, *syura* memang diartikan dengan mengambil keputusan secara bersama.<sup>22</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata musyawarah diambil dari bentukan kata *syura*; yang berarti menawarkan sesuatu.<sup>23</sup> Istilah *syuro* yang dipakai dalam ilmu politik, biasanya juga dikaitkan dengan istilah parlemen, demokrasi, system republic suatu pemerintahan; yang biasanya juga dikaitkan dengan slogan “dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat”. Yang

---

<sup>21</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>. Diakses tanggal 16 September 2019.

<sup>22</sup> Dalam kamus Bahasa Arab, *syura* yang dipakai dalam kata *syurtu al-* ‘asal artinya aku mengambil madu dari tempatnya”; menunjukkan bahwa *syura* berarti “mengambil sesuatu dari tempatnya yakni dari seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya”. Lihat : Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura*, terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta, Lkis, 2003) h. 26.

<sup>23</sup> Ali Nurudin, *Quranic Society* (PT. Gelora Aksara Pratama, 2006) hal. 226.



dalam pandangan Dawam Raharjo, *syura* juga dapat diibaratkan dengan forum tempat orang berbicara, tukar pikiran, berpendapat dan memecahkan suatu persoalan secara bersama.<sup>24</sup>

Syura atau musyawarah secara sederhana dapat dianggap sebagai model penetapan hukum yang harus dijalankan oleh suatu pemerintahan. Menurut al-Qurtubi, apabila seorang kepala Negara tidak mau bermusyawarah dengan dengan ahli ilmu dan agama, maka dia harus dipecat.<sup>25</sup> Secara historis, Nabi sendiri ketika melakukan musyawarah sering mengikutsertakan para sahabat tertentu yang memang memiliki pandangan yang tajam.<sup>26</sup>

Ayat-ayat tentang musyawarah yang ada dalam al-Quran akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. QS. Ali Imron; 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah

---

<sup>24</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Quran* (cet. 1, Jakarta, Pramadina, 1996) h. 440.

<sup>25</sup> Abdullah al-Dumaji, Imamah ' Uzhma, terj. Umar Mujtahid (Jakarta, Ummul Qura, 2016) h. 482-483.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta, Prenada Media, 2014) h. 218.

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini menyebutkan bahwa Allah menerangkan tentang sifat nabi Muhammad ketika hendak melakukan musyawarah yaitu berlemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Konteks ayat ini turun berkaitan dengan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Sekalipun demikian, dalam musyawarah Nabi tidak boleh memperlakukan mereka dengan keras tetapi justru dengan lemah lembut dan memaafkan.

## 2. QS. Al-Syura; 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat yang turun di Makkah (Makkiyah) ini menegaskan bahwa kaum muslimin saat itu selalu mengamalkan perintah Allah, mengerjakan shalat, bermusyawarah sesama mereka serta menafkahkan rezki mereka. Menurut Fazlur Rahman, musyawarah dengan demikian merupakan tradisi manusia sebagai makhluk social yang sudah ada sejak masa yang lama. Bahkan al-Quran sendiri

melihatnya sebagai institusi sosial yang tidak berdasarkan sukuisme melainkan keimanan; yang dalam pandangan al-Maraghi justru sebagai fitrah manusia.<sup>27</sup>

#### 6. Surat Al-Syura ; 15

فَلذَلِكَ فَادُعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya :

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".

Dalam ayat ini Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk berlaku adil kepada sesama manusia; dengan sebab karena sebenarnya Tuhan mereka dan Tuhan kaum muslimin adalah sama yaitu Allah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ayat ini turun sebelum ada kewajiban untuk jiha.

---

<sup>27</sup> Ali Nurdin, Quranic Society; h. 230

## 7. Surat Al-Hujurat ; 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

*Syu'ub* dalam ayat ini artinya adalah bangsa-bangsa yang berasal dari kalangan non-Arab; sementara *qabilah* adalah bangsa-bangsa yang berasal dari kalangan Arab. Dalam sejarahnya, masyarakat Arab saat itu memang menggunakan namanya dengan nama suku mereka. Ketika Islam datang, maka tidak ada *syu'ub* atau *qabilah* yang merasa paling baik atau paling mulia. Sebab kemuliaan yang dikenalkan Islam saat itu adalah kemuliaan dari aspek keagamaan dan ketakwaan.

## 8. Surat An-Nisa : 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam agar menunaikan amanah kepada ahlinya dan memutuskan suatu masalah hukum dengan adil. Amanat atau amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan. Amanat Allah yang diberikan kepada hambanya berupa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Juga nikmat-nikmat Allah harus selalu dijadikan sebagai pendekatan (taqarrub) kepada Allah. Begitu juga amanat seseorang kepada orang lain harus dikerjakan; misalnya berupa titipan, rahasia dan lain-lain. Adapun sifat adil yang disebutkan pada ayat di atas, juga menunjukkan bahwa dalam masalah pengambilan keputusan hokum atas suatu perkara, tidak boleh dilakukan secara sewenang; tetapi harus dengan adil dan bijaksana. Ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa Allah maha mendengar dan melihat apa yang sudah dilakukan oleh manusia; dikaitkan dengan amanat dan keadilan yang harus dilaksanakan, maka amanat dan keputusan adil itu pasti akan dilihat oleh Allah swt.

9. Surat Ali 'Imran ; 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Pada ayat ini juga Allah menyuruh kepada masyarakat Islam agar menjadi segolongan manusia yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Orang yang melakukan hal ini dianggap sebagai orang yang beruntung.

10. Surat An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Nabi Muhammad dan orang-orang yang menjadi pengurus suatu masalah. Jika ada diantara mereka berselisih paham terhadap suatu masalah, maka harus dikembalikan kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya. Hal itu jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

4. *Ayat-Ayat tentang Keadilan (al-‘adalah) dan persamaan (musawah)*

1. *QS. Al-Nahl : 90 :*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَظْمِكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl [16] : 90).

Menurut Quraish Shihab, dalam ayat ini Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang

tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.

## 2. QS. Al-Maidah : 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Ma'idah [5]: 8).

Dalam tafsir a-Mishbah, disebutkan bahwa diharapkan orang-orang yang beriman itu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan melaksanakan persaksian di antara manusia dengan benar. Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi kemurkaan-Nya(1). Takutlah kalian kepada Allah dalam setiap urusan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang kalian perbuat dan Dia akan memberi balasan yang setimpal. (1) Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan



perlakuan tidak adil. Hal itu diterapkan pada hubungan antar individu, dan hubungan antar institusi atau negara. Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada takwa. Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan. Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan.

### 3. Qs. Al-Hadid : 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al-Hadid [57]: 25).

Menurut Ibn Katsir, yang disebut dengan kebenaran dan keadilan pada kata “bil qisth” yaitu mengikuti para rasul sesuai dengan berita yang disampaikan oleh mereka dan menaati mereka dalam semua perintah yang mereka tegaskan. Karena sesungguhnya

apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah kebenaran yang mutlak yang tiada kebenaran lagi di baliknya.

4. QS. Al-Nisa ; 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوْا أَوْ تُعْرَضُوا  
فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”.

Dalam pandangan Quraish Shihab, keadilan yang harus ditegakkan adalah bukan karena menyukai orang kaya dan mengasihi orang miskin; karena yang membuat mereka kaya miskin itu pada hakikatnya adalah Allah. Sesungguhnya hawa nafsu itu telah menyimpang dari kebenaran, maka janganlah kalian mengikutinya, supaya kalian dapat berlaku adil. Jika kalian bepaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberi balasannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula.

5. QS. Al-Nisa ; 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Ayat ini turun tentang seseorang yang memegang kunci Ka’bah yaitu Usman bin Thalhah al-Hajabi; yang pada saat *fathu* Makkah, Ali mengambilnya dan menyerahkannya kepada Rasul. Tetapi justru setelah ayat ini diturunkan, Rasul malah mengembalikannya kepada Usman dan menyuruhnya untuk menjaganya sehingga Usman masuk Islam. Sekalipun demikian, ayat ini memiliki pesan umum kepada kaum muslimin untuk berlaku adil dalam memberikan hukuman kepada manusia.

6. QS. Al-Maidah; 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Ma’idah [5]: 8).

Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil. Hal itu diterapkan pada hubungan antar individu, dan hubungan antar institusi atau negara. Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur’ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada takwa. Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan. Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan.

#### 7. QS. Al-Nahl ; 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ

Artinya :

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. [an-Nahl/16:126]

Ayat ini juga menurut Qurasih Shihab menyuruh kaum muslimin yang bermaksud memberi hukuman pada orang yang telah menyakiti mereka, agar memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Tidak boleh melampaui batas dengan melebihi dari balasan yang sepadan. Kendatipun demikian, jika kaum muslimin memilih bersabar dan tidak menuntut balas, maka hal itu akan lebih baik bagi mereka di dunia dan akhirat. Karena itu kaum muslimin diharapkan dapat menghukum mereka dengan tujuan menegakkan kebenaran bukan untuk kepentingan pribadi.

8. QS. Fusshillat; 34 :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ  
حَمِيمٌ

Artinya :

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. [Fusshilat/41:34]

Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan sifat yang baik tidak sama dengan sifat yang buruk. Balaslah perlakuan tidak baik yang datang dari pihak lawan dengan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan seperti itu akan membuat orang yang bermusuhan denganmu seolah-olah menjadi seorang teman yang tulus.

9. QS. Al-Hujurat; 9

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [al-Hujurât/49:9]

Ayat ini juga menegaskan bahwa setelah Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil; Allah juga menegaskan bahwa Dia sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil tersebut. Dengan kata lain, setelah ada perintah dari Allah, di dalam ayat ini juga ada penegasan bahwa yang melakukannya akan dicintai Allah.

10. QS. Al-Nahl ; 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. – (Q.S An-Nahl: 90)

Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan

mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.

11. QS. Al-Nahl ; 126 :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya :

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang serupa dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.

Jika kita hendak memberi hukuman pada orang yang telah menyakiti kalian, maka berikanlah mereka hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jangan melampaui batas dengan melebihi dari balasan yang sepadan. Kendatipun demikian, yakinlah, jika kalian memilih bersabar dan tidak menuntut balas, maka hal itu akan lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat. Hukumlah mereka dengan tujuan menegakkan kebenaran bukan untuk kepentingan pribadi.

## 5. Ayat Tentang Menunaikan Amanah

QS. An-Nisa; 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Makna kata: *تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ* menunaikan amanah adalah menyerahkannya kepada orang yang berhak. Amanah adalah suatu hal yang dipercayakan seseorang, berupa perkataan, pekerjaan ataupun benda. *الْعَدْلِ* keadilan adalah lawan dari kezhaliman dan melenceng dengan mengurangi atau menambah. *نِعِمَّا يَعِظُكُمْ* memerintahkan untuk menunaikan amanah dan hukum dengan adil.

Keadilan disini adalah dengan tidak condongnya qadhi atau penguasa kepada salah satu pihak yang bersengketa, dan agar tidak mengutamakan seseorang atas orang lain dikarenakan hubungan kekerabatan, jabatan, kemaslahatan pribadi, atau hawa nafsu. Akan tetapi seorang qadhi memberi putusan bagi yang berhak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan seorang penguasa harus memperlakukan rakyatnya dengan sama rata tanpa



mengutamakan seseorang kecuali dengan kadar keutamaan yang memang dimiliki orang tersebut, berupa keuletannya dalam beramal, atau berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau kekuatannya dalam berjihad, dan lain sebagainya.

QS. Al-Anfal ; 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, percaya dan tunduklah kepada kebenaran. Allah tidak membenarkan ada orang dari kalangan kalian yang berkhianat kepada-Nya dan rasul-Nya dengan berpihak kepada penentang-penentang kebenaran itu. Atau mengkhianati orang lain dalam soal pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat orang lain sedangkan kalian memahami perintah dan larangan-Nya

## 6. Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar

QS. Ali 'Imran; 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'an dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar). Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna.ppp

QS. Ali 'Imran : 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ  
أَمَّنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu

lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Mereka dianggap umat terbaik, karena mereka menyempurnakan diri mereka dengan iman yang menghendaki untuk melaksanakan segala perintah Allah, dan karena mereka menyempurnakan pula orang lain dengan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau dengan kata lain mengajak manusia kepada Allah, berjihad dan mengerahkan kemampuan untuk mengembalikan mereka dari kesesatan dan kemaksiatan. Ayat ini merupakan dalil keutamaan umat Nabi Muhammad disbanding umat-umat yang lain. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **إِنَّكُمْ تِيْمُونُ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَ أَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ** "Sesungguhnya kalian yang menyempurnakan menjadi tujuh puluh umat. Kalianlah umat yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 2301). Dalam ayat ini terdapat seruan halus dari Allah kepada Ahli Kitab untuk mengajak mereka beriman (masuk Islam), namun sayang kebanyakan mereka menolak. Bahkan lebih dari itu, mereka pun memusuhi orang-orang yang beriman dengan berbagai bentuk permusuhan, tetapi semua itu tidaklah membahayakan kaum mukmin selain gangguan kecil saja.

QS. At-Taubah ; 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin wanita satu sama lain saling mendukung, karena mereka disatukan oleh iman. Mereka menyuruh berbuat yang makruf, yaitu segala sesuatu yang dicintai Allah -Ta'ālā-, seperti menjalankan ajaran tauhid dan salat, mencegah perbuatan yang mungkar, yaitu segala sesuatu yang dibenci Allah -Ta'ālā-, seperti menjalankan kekafiran dan praktik riba, mereka menunaikan salat dengan sebaik-baiknya, taat kepada Allah, dan taat kepada rasul-Nya. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji itu akan Allah masukkan ke dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menciptakan makhluk-Nya, mengatur alam semesta, dan menetapkan syariat-Nya.

QS. An-Nahl : 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Wahai Nabi, serulah manusia menuju agama Allah yang benar, yaitu Islam dengan perkataan yang penuh hikmah yang menjelaskan tentang kebenaran, yaitu dengan dalil nyata dan tidak samar, dengan pelajaran yang bermanfaat serta ucapan yang baik dan lemah lembut tanpa menyakiti. Dan berbicaralah atau bercakap-cakaplah kamu dengan mereka menggunakan cara percakapan paling baik berupa keramahan dan kelembutan, dan ucapan yang penuh kedamaian. Sesungguhnya Tuhanmu itu lebih tahu tentang orang yang menyimpang dari jalan keimanan. Dia juga lebih tahu tentang orang yang mendapat petunjuk, lebih tahu tentang kebenaran, serta menghendaki dakwah dan risalahmu.

QS. Al-Ahzab : 45 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya :

Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan,

Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi atas orang-orang yang mendapat risalah itu, yaitu atas keimanan atau pendustaan mereka. Engkau juga Kami utus sebagai pemberi kabar gembira berupa surga bagi orang yang mempercayai dan mentaatimu. Juga sebagai pemberi peringatan atas azab neraka bagi mereka yang mendustakan dan dan mendurhakaimu.

QS. Fussilat : 33 :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya :

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"

Tidak ada seorangpun yang lebih bagus perkataannya dibandingkan orang yang mengajak untuk mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat-Nya, mengerjakan amal saleh yang diridai oleh Rabbnya, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang

yang berserah diri lagi tunduk kepada Allah.” Barangsiapa melakukan hal itu seluruhnya, maka dia adalah manusia yang paling bagus perkataannya.

QS. At-Tahrim : 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ  
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta beramal dengan syariat Allah; Ambillah perkara untuk menjaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari kemarahan dan kebencian Allah dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ketahuilah bahwa balasan bagi yang membangkang dan melanggar perintah-perintah Allah adalah masuknya kalian ke dalam neraka. Dan neraka ini bahan bakarnya adalah kayu api dan manusia yang menyala-nyala, sebagaimana juga di dalam neraka ini ada malaikat yang kuat dan bengis hatinya yang akan mengadzab penghuni nereka, mereka para malaikat tidak bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan dari segala kondisinya;

Bahkan mereka melaksanakan perintah Allah dengan tanpa nanti-nanti.

#### 7. Ayat tentang hukum Allah

Surat Al-Ma'idah ; 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya :

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Maksudnya Al Quran mengandung apa yang dikandung dalam kitab-kitab sebelumnya, dan menambah lagi tuntutan-tuntutannya dan



akhlak bagi diri. Al Qur'an mengandung semua kebenaran yang dibawa kitab-kitab sebelumnya, sehingga ia memerintahkannya dan mendorongnya. Di dalam Al Qur'an terdapat berita tentang orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, di dalamnya terdapat hukum dan hikmah serta hukum-hukum yang ditunjukkan kitab-kitab sebelumnya, oleh karenanya isi kitab-kitab terdahulu, jika disaksikan oleh Al Qur'an sebagai kebenaran, maka hal itu diterima, namun jika tidak disaksikan demikian, bahkan didustakan, maka hal itu ditolak karena telah dirobah oleh tangan manusia.

QS. An-Nisa ; 60 :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا  
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya :

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Tidakkah kamu -wahai Rasul- melihat pertentangan yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik dari kalangan Yahudi yang bohong dan mengaku beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepadamu dan kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya, mereka itu ingin mencari ketentuan hukum, saat mereka

berselisih paham di luar syariat Allah, yakni putusan-putusan hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal mereka diperintahkan ingkar kepadanya. Dan setan ingin menjauhkan mereka dari kebenaran dengan sejauh-jauhnya, sehingga mereka tidak bisa menemukan jalan yang benar.

#### 8. *Ayat tentang Tanggung Jawab*

QS. Al-Baqarah ; 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah) *وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan) *وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*.  
Yakni jangan kalian menyerahkan diri kepada hal-hal yang menyebabkan kebinasaan, akan tetapi rencanakanlah untuk kalian sebab-sebab keselamatan. Dan termasuk dari kebinasaan adalah berdiam diri menjaga harta benda untuk memperbaikinya dan meninggalkan jihad fii sabilillah.

QS. Al-Ma'idah ; 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan hukuman bagi pencuri, yaitu tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi berupa manik-manik dengan takaran senilai seperempat dinar adalah pemotongan tangan dari bagian pergelangan untuk mencegahnya melakukan pencurian lagi, sebagai hukuman dari Allah, dan siksaan dahsyat yang digunakan sebagai pelajaran bagi orang lain. Allah adalah Dzat Maha Kuat, yang tidak mungkin ditaklukkan, dan Maha Bijaksana terhadap ciptaan dan aturanNya. Al-Kalbi berkata: “Ayat ini turun terkait Thu'mah bin Ubairaq, yaitu pencuri baju besi, sebagaimana kisahnya yang telah dijelaskan di surah An-Nisa' ayat 105”

QS. Ali 'Imran ; 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Berdasarkan ayat ini, maka di antara sarana dakwah yang ampuh, yang dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia, di samping adanya pujian dan pahala yang istimewa bagi pelakunya. Karena tidak sempurna memenuhi hak Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini merupakan sikap ihsan. Oleh karena itu, Beliau menggabung antara sikap memaafkan dan sikap ihsan. Maksudnya: dalam urusan yang butuh adanya musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Misalnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain.

QS. At-Tahrim ; 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادِكُمْ وَرُءُوسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta beramal dengan syariat Allah; Ambillah perkara untuk menjaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari kemarahan dan kebencian Allah dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ketahuilah bahwa balasan bagi yang membangkang dan melanggar perintah-perintah Allah adalah masuknya kalian ke dalam neraka. Dan neraka ini bahan bakarnya adalah kayu api dan manusia yang menyala-nyala, sebagaimana juga di dalam neraka ini ada malaikat yang kuat dan bengis hatinya yang akan mengadzab penghuni nereka, mereka para malaikat tidak bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan dari segala kondisinya; Bahkan mereka melaksanakan perintah Allah dengan tanpa nanti-nanti.

#### 9. Ayat tentang Kebebasan

QS. Al-Baqarah ; 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Disebabkan kesempurnaan agama ini dan jelasnya ayat-ayatnya, maka tidak diperlukan tindakan pemaksaan untuk memeluknya, bagi orang-orang yang diambil jizyah darinya. Bukti-bukti petunjuk itu amat nyata, yang dapat menampakkan mana yang haq dan mana yang batil, petunjuk dan kesesatan. Maka barang siapa yang kafir pada semua sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah teguh dan istiqamah di atas jalan terbaik dan teguh dalam beragama dengan memegangi pegangan yang paling kuat yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan hamba-hambaNya, lagi Maha Menegetahui perbuatan-perbuatan mereka dan niat-niat mereka dan akan memberikan balasan kepada mereka sesuai amal perbuatan itu.

QS. Yunus ; 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya :

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۗ (Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya) Yakni mereka pasti akan bersatu dalam keimanan tanpa ada perselisihan atau pertengkarannya, namun Allah tidak menghendaki itu karena hal ini menyelisihi kemaslahatan yang dikehendaki Allah berupa hikmah yang dalam. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya) Karena hal itu diluar kemampuan dan kekuasaanmu wahai Muhammad.

## **B. Realitas Politik Indonesia; Suatu Fenomena**

Sub bab ini akan menguraikan bagaimana fenomena politik yang terjadi di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan pewacanaan ayat-ayat al-Quran yang dilakukan dalam politik. Deskripsi sub bab ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana ayat-ayat al-Quran itu digunakan dalam hubungannya dengan politik.

### **1. Kasus Ahok**

Kasus Ahok yang dituduhkan melakukan penistaan agama dapat kita sebut sebagai kasus politik paling fenomenal yang terjadi di Indonesia. Kasus ini melibatkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), gubernur DKI Jakarta (2014-2017) yang dituduhkan menista agama karena menggunakan ayat al-Quran dalam pernyataan politiknya. Ahok kemudian dipenjara dan setelah sebelumnya kalah dalam Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 berhadapan dengan Anies Baswedan.

Dalam situs berita *liputan6.com*, kasus Ahok ini digambarkan secara rinci:

**Liputan6.com, Jakarta** - Tak pernah tebersit di benak Basuki Tjahaja Purnama atau [Ahok](#), pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 30 September 2016 akan membawanya ke penjara. Saat itu, Ahok mengutip penggalan Surat Al Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya demi mengalahkannya pada Pilkada Bangka Belitung. Beberapa hari kemudian, pidato Ahok tersebar luas di media sosial. Banyak pihak yang menuduh Ahok menistakan agama.

Pada 7 Oktober 2016, Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian. Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim itu berisi laporan penghinaan agama. Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. Di tengah proses laporan itu, demonstrasi dan desakan dari masyarakat bermunculan di berbagai wilayah. Puncaknya terjadi di Jakarta pada 4 November 2016. Aksi besar-besaran itu membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI 2017 di sejumlah wilayah Jakarta.

Sebagian masyarakat menuntut polisi agar segera memproses perkara [Ahok](#) dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Dia juga berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi, gerakan massa kian



masif sehingga kepolisian menganggap hal itu sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Presiden Joko Widodo pun turun tangan. Ia menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera memproses kasus Ahok dengan cara terbuka dan transparan.

Sebelas hari setelah aksi besar pada November 2016, polisi melakukan gelar perkara di Mabes Polri secara terbuka tetapi terbatas. Awalnya, gelar perkara itu terbuka untuk umum, tapi pada pukul 09.00 WIB tertutup hingga pukul 18.00 WIB. Pada gelar perkara itu, kedua belah pihak baik pihak yang melapor ataupun pihak terlapor diundang. Dari pelapor, hadir sejumlah ahli, termasuk di antaranya pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, yang lantang dan terus-menerus memimpin aksi massa besar-besaran.

Kompolnas dan Ombudsman juga hadir dalam gelar perkara itu. Namun, Ahok tak hadir dan diwakili penasihat hukumnya, Sirra Prayuna, serta sejumlah pengacara dan ahli. Ahli dari pihak Ahok bahkan datang dari luar kota.

Persidangan perdana Ahok berlangsung pada 13 Desember 2016 yang digelar di bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pengamanan superketat pun dilakukan demi menjaga keamanan sidang.

Sidang perdana itu beragendakan pembacaan dakwaan Ahok. Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP karena diduga menodakan agama. Dakwaan itu

ditanggapi kubu Ahok dengan nota keberatan atau eksepsi. Pada sidang ke-19, Kamis, 20 April 2017, JPU menuntut Ahok bersalah. Atas nama hukum, jaksa meminta majelis hakim menghukum Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Majelis kemudian menghukum Ahok 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. "Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ([Ahok](#)) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama," kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto, Selasa 9 Mei 2017.<sup>28</sup>

Kasus Ahok ini disebut-sebut oleh Ismail Hasani, Direktur Riset SETARA Institute sebagai bentuk politisasi identitas<sup>29</sup> yang merupakan bagian dari kejahatan politik. Pasca kasus Ahok, menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), banyak pemilih muslim yang menginginkan pemimpin bukan dari kalangan nonmuslim.<sup>30</sup>

Ahok dianggap melakukan penistaan agama karena menggunakan ayat Al-Quran (surat Al-Maidah 51) dalam penjelasan program kerjanya di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam persidangan, saksi ahli dari Rais Syuriah PBNU, KH. Ahmad Ishomuddin, menilai bahwa kata *auliya* bersifat multi tafsir, bukan mono tafsir sebagaimana pandangan Hamdan

---

<sup>28</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3322122/mengulik-kembali-perjalanan-kasus-ahok>; diakses tanggal 25 September 2019 pukul 22.26.

<sup>29</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/12/00032891/kasus.hukum.ahok.dinilai.sebagai.bentuk.politisasi.identitas.>; diakses tanggal 25 September 2019, pukul 22.

47.  
<sup>30</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180924195859-32-332825/anti-pemimpin-nonmuslim-meningkat-usai-kasus-ahok>; diakses tanggal 2 Oktober 2019.

Rasyid, saksi dari MUI, yang mengatakan bahwa *auliya* artinya hanya pemimpin.<sup>31</sup>

Begitu juga dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi, bahwa surat al-Maidah 51 tidak bisa dilepaskan dari surat al-Mumtahanah ayat 8 yang mengatakan bahwa yang tidak boleh dipilih sebagai *auliya* itu adalah orang non muslim yang "*memerangi kamu dari negeri kamu*"; kalau sekedar berbeda agama tidak masalah.<sup>32</sup>

Akibat kasus Ahok ini, pemahaman masyarakat Islam terbelah menjadi dua kelompok; (1) kelompok yang menganggap Ahok telah menghina al-Quran (MUI dkk); dan (2) kelompok yang menganggap Ahok tidak menghina al-Quran (Buya Syafii dkk).<sup>33</sup>

## 2. Kasus Doa Neno Warisman

Kasus doa yang diucapkan oleh Neno Warisman ini dilakukan dalam acara "Malam Munajat 212" di lapangan Monas, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2019. Dalam acara tersebut, Neno tampil di atas panggung dan membacakan puisi yang menyerupai doa. Dalam puisinya, Neno membacakan penggalan doa yang cukup kontroversial, "*Karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir Ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu*".

Dalam acara ini yang berlangsung pada malam Jumat ini, dimulai dari pukul 18.00 sampai 23.00, dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>31</sup> <http://www.muslimoderat.net/2017/03/gus-ishom-konteks-al-maidah-51-adalah-peperangan-kh-maruf-amin-ayat-perang-tak-relevan-di-indonesia.html>; diakses tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>32</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3459701/rais-syuriah-nu-jelaskan-soal-makna-al-maidah-51>; diakses tanggal 7 Oktober 2019

<sup>33</sup> <https://www.indonesiana.id/read/107749/al-maidah-51-mui-vs-buya-syafii-maarif>; diakses tanggal 7 Oktober 2019.

(MUI) DKI Jakarta bersama Lembaga Dakwah Front dan Majelis Taklim se Jabodetabek. Acara ini bertemakan “Mengetuk Pintu Langit untuk Keselamatan Agama, Bangsa dan Negara”; dan dihadiri oleh para ulama dan politisi Nasional seperti Zulkifli Hasan (Ketua Umum partai PAN), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR), Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan PAN), Sohibul Iman (Ketua Umum partai PKS), Titiek Soeharto (Wakil Ketua Umum Partai Berkarya) dan Neno Wariwsman (aktivis dan seniman).<sup>34</sup>

Neno memang tidak menggunakan ayat-ayat al-Quran tetapi hanya sekedar membacakan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad ketika perang Badar. Dalam perang Badar tersebut, situasi umat Islam memang dihadapkan pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Puisi Neno penulis kutipkan sebagai berikut :

*Allahu Akbar*

*Puisi munajat kuhantarkan padamu wahai berjuta-juta hati yang  
ada di sini*

*Engkau semua bersaudara dan kita bersaudara tersambung, terekat,  
tergabung bagai kalung lentera di semesta*

*Sorot-sorot mata kalian bersinar, wahai saudara*

*Mencabik-cabik keraguan*

*Meluluhlantakkan kesombongan*

*Karena mata-mata kalian nan jernih mengabarkan pesan*

*kemenangan yang dirindukan, insyaallah, pasti datang*

*Allahku Akbar*

*Kemenangan kalbu yang bersih*

---

<sup>34</sup> <https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/23/ini-isi-puisi-lengkap-neno-warisman-di-malam-munajat-212-yang-dinilai-kampanye-terselubung?page=4>. Diakses tanggal 11 Oktober 2019.

*Kemenangan akal sehat yang jernih  
Kemenangan gerakan-gerakan yang berkiprah tanpa pamrih  
Dari dada ini telah bulat tekad baja  
Kita adalah penolong-penolong agama Allah  
Jangan halangi  
Jangan sanggah  
Jangan politisasi  
Sebab ini adalah hati nurani  
Dari mulut-mulut kita telah terlantun salawat, zikir, dan doa  
bergulir  
Mengalir searah putaran bintang-bintang bertriliun banyaknya  
Tersatukan dalam munajat 212  
Miliaran matahari itu saudaraku  
Merekatkan diri menjadi gumpalan kabut cahaya raksasa di semesta  
Bukti kebesaran Allah Azza Wa Jalla  
Begitulah kita saudaraku  
Harusnya kita saling merekat  
Wahai para pejuang fisabilillah di dalamnya  
Ayo munajat  
Ayo rekatkan umat  
Jadikan barisanmu kuat dan saling rekat  
Rekatkan Indonesiamu  
Rekatkan jiwa-jiwamu  
Rekatkan langkah dan tindakanmu  
Ya Allah  
Berjuta tangan para pejuang agamamu ini mengepalkan tinju  
mereka*

*Berseru-seru mereka  
Menderu-deru mereka  
Di setiap jengkal udara hingga terlahir takbir kemenangan  
Kemenangan di ujung lelah menggema takbir bersahut-sahutan  
Berjuta sajadah akan kita hamparkan sebentar lagi, kawan  
Berjuta kepala menangis bersujud bersyukur  
Basah air mata dalam bahagia kemenangan sebentar lagi tiba  
Allahumma inni a'uzubika min jahdil bala'i wa darkisy syaqa'i wa  
su'il qada'i wa syamatatil a'da'i  
Jauhkan kami dari bala musibah yang tak dapat kami atasi  
Lindungi kami dari kegembiraan orang-orang yang membenci  
kami  
Rekatkan jiwa-jiwa patriot kami dalam keikhlasan  
Di nadi-nadi kami  
Di jantung-jantung kami  
Di pundak-pundak kami  
Di jari-jari kami  
Yang telah memilih untuk hanya selalu berdua  
Kita dan Allah Azza Wa Jalla  
Selalu berdua  
Kita dan Rasulullah kekasih semesta  
Selalu berdua  
Kita dan saudara mukmin saling menjaga  
Selalu berdua  
Kita dan pemimpin yang membela hak-hak umat seutuhnya  
Duhai Allah Rabb  
Jangan kau jadikan hati kami bagai si penakut pengecut*

*Sebab kami terlahir di tanah para pahlawan pemberani  
Yang rela mengorbankan jiwa raga harta dan segalanya  
Jangan jadikan hati kami lalai dan gentar  
Karena kami lahir dan besar dibimbing para ulama kami yang  
sabar  
Menetap jantung-jantung kami untuk menjadi pendekar  
Yang berani berpihak pada yang benar  
Duhai Allah  
Jangan kau jadikan hati kami dari tertutup  
Dari cahaya terang kebenaran yang menyala di malam-malam  
munajat  
Saat Engkau turun ke jagat dunia  
Telah Engkau bersaksikan  
Kami tegak berdiri, ya Allah  
Kami meminta menangis hingga basah sekujur diri kepada-Mu  
Seluruh harapan kami dambakan  
Akan Kau tolong atau Engkau binasakan  
Akan Kau menangkan atau Engkau lantakkan  
Itu hak-Mu  
Namun kami mohon jangan serahkan kami pada mereka  
Yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami  
Dan jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan menangkan kami  
Karena jika Engkau tidak menangkan  
Kami khawatir ya Allah  
Kami khawatir ya Allah  
Tak ada lagi yang menyembah-Mu  
Ya Allah*

*Izinkan kami memiliki generasi yang dipimpin  
Oleh pemimpin terbaik  
Dengan pasukan terbaik  
Untuk negeri adil dan makmur terbaik  
Takdirkanlah bagi kami  
Generasi yang dapat kami andalkan  
Untuk mengejar nubuwwah kedua  
Wujud dan nyata  
Dan lahirnya sejuta Al Fatih di Bumi Indonesia  
Allah Rabb  
Puisi munajat ini kubaca bersama saudara-saudaraku  
Mujahid mujahidah yang datang berbondong-bondong dari segala  
arah  
Maka inilah puisi munajat  
Mengetuk-ngetuk pintu langit-Mu  
Bersimpuh di pelataran keprihatinan  
Atas ketidakadilan  
Atas kesewenang-wenangan  
Atas kebohongan demi kebohongan  
Atas ketakutan dan ancaman yang ditebar-tebarkan  
Atas kepongahan dalam kezaliman yang dipamer-pamerkan  
Dalam pertunjukan kekuasaan  
Yang mengkerdikan Tuhan  
Yang menantang kuasa Tuhan  
Yang tidak percaya bahwa Tuhan pembalas sempurna  
Ya Rabb  
Engkaulah yang memiliki kekuasaan mutlak di seluruh jagat ini*



*Allah*

*Ini puisi munajat*

*Yang mengetuk-ngetuk pintu langit-Mu*

*Turunkanlah malaikat berbaris-baris*

*Burung-burung Ababil*

*Dan semut-semut pemadam api Ibrahim*

*Munajat penuh harap*

*Kau turunkan pertolongan yang dijanjikan*

*Bagi yang terdera*

*Bagi pemimpin yang terfitnah*

*Bagi ulama yang dipenjara*

*Bagi pejuang yang terus dihadang-hadang*

*Bagi pembela keadilan yang digelandang ke bilik-bilik pesakitan*

*Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad*

*Wa asyghilidz dzolimin bidz dzolimin*

*Wa akhrijna min baynihim saalimin*

*Wa 'ala alihi wa shohbihi ajma'in*

*Untuk hari depan yang lebih baik*

*Untuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat bersama-Mu,*

*bersama rasul-Mu*

*Dalam ketinggian titah-Mu, kami bermunajat*

*Keluarkan kami dari gelap*

*Keluarkan kami dari gelap*

*Keluarkan kami dari gelap*

*Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin*

*Wasalamualaikum*

*Allahu Akbar*

*Allahu Akbar*

*Allahu Akbar*

Akibat doa ini, Neno kemudian dikritik oleh ketua PBNU Robikin Emhas sebagai orang yang ingin menghadapkan antara kelompok muslim dan kafir<sup>35</sup>; juga dinilai oleh Buya Syafii Maarif sebagai orang yang tidak mengerti agama dan biadab<sup>36</sup>; bahkan oleh Makruf Amin dinilai sebagai doa yang tidak manjur.<sup>37</sup>

Dari kasus ini setidaknya memperlihatkan kepada kita bagaimana agama selalu dibawa ke dalam persoalan politik dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dalam catatan *Setara Institute*, ada kenaikan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) pada pertengahan tahun 2018 dengan 2017. Hingga pertengahan Juni 2017, terdapat 80 peristiwa dengan 99 tindakan pelanggaran KBB. Sementara itu, per Juni 2018, jumlahnya melonjak menjadi 109 peristiwa dengan 136 tindakan pelanggaran. Dari semua itu, penyumbang terbesar pada tahun 2018 adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mulai memanas pada Februari. Akibatnya, politisasi agama marak terjadi.<sup>38</sup>

Menurut catatan Setara Institut juga, politisasi agama digunakan ke dalam dua bentuk, yaitu gerakan tidak memilih pemimpin yang tidak seagama dan kampanye hitam atau *black campaign*. Cara mempolitisasi

---

<sup>35</sup> <https://tirto.id/puisi-doa-neno-warisman-politis-mengancam-dan-menghakimi-lawan-dhDz>

<sup>36</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4451264/puisi-munajat-212-dan-doa-kesukaan-neno-warisman>

<sup>37</sup> <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3902817/maruf-amin-doa-neno-warisman-di-munajat-212-tidak-manjur>

<sup>38</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/00005431/setara-institute-politisasi-agama-dalam-pilkada-2018-lewat-rekayasa-fakta>

agama pada pilkada kemarin adalah merekayasa fakta; misalnya status haji calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat yang diragukan kebenarannya; atau Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil yang dikatakan pro terhadap LGBT. Dalam pandangan Halili, ketua Setara Institut, cara tersebut adalah bentuk baru dalam politisasi agama untuk menyerang peserta pilkada yang seagama.<sup>39</sup>

### **3. Politisasi Masjid**

Yang dimaksud dengan *politisasi masjid* dalam penelitian ini adalah istilah yang muncul berkaitan dengan kegiatan suatu masjid yang terkait dengan masalah politik. Kegiatan ini biasanya bersifat kampanye atau ajakan kepada masyarakat untuk memilih satu pasangan dalam suatu pemilihan umum, baik calon legislative atau calon presiden. Karena itu, penulis melihat bahwa politisasi masjid dapat berarti menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan politik; baik secara verbal berupa kampanye atau diskusi; juga secara praktis seperti melakukan kegiatan ibadah bersama para tokoh politik.

Dalam persoalan politik di Indonesia, kasus politisasi masjid muncul seiring dengan besarnya peran ulama yang ikut terlibat dalam politik praktis. Kasus Ahok yang menjadi salah satu sebab menguatnya politisasi masjid, menjadikan sebagian masyarakat muslim, termasuk ulama, turut terlibat dalam memberikan penilaian dan bahkan keberpihakan kepada Islam; yang melalui QS. al-Maidah 51 menunjuk Ahok sebagai calon pemimpin kafir.

---

<sup>39</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/00005431/setara-institute-politisasi-agama-dalam-pilkada-2018-lewat-rekayasa-fakta>



### **BAB III**

## **AYAT-AYAT POLITIK DALAM WACANA KIAIYI-SANTRI; SUATU NARASI DESKRIPTIF**

Ada dua hal yang akan dibahas dalam bab ini; *pertama*, bagaimana wacana kiai-santri dalam melihat ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran; dan *kedua*, akan dibahas analisis pada aspek apa saja wacana tafsir kiai-santri tentang ayat-ayat politik dan bagaimana mereka membuat interpretasi dan tafsirannya. Deskripsi bab ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana sebenarnya para kiai-santri yang ada di kota Palembang membicarakan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan masalah politik. Deskripsi ini merupakan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada kiai-santri di beberapa pondok pesantren di kota Palembang. Untuk mendapatkan wacana yang lebih baik, tema pertanyaan juga diajukan kepada masalah-masalah yang lebih umum; seperti apa arti politik; arti kata imam, khalifah atau ulul amri; arti kata *wali* atau *aulya*; bagaimana konsep musyawarah; apa arti dari istilah keadilan; apa maksud dari perselisihan; *amar ma'ruf nahi munkar* yang ada dalam al-Quran. Dari jawaban ini, nantinya akan didapatkan suatu pola pemahaman yang umum dan global untuk kemudian dicarikan beberapa aspek yang berkaitan dan saling berhubungan dalam pandangan mereka.

#### **A. Wacana Politik ; Narasi Umum**

Pandangan para kiai-santri yang ada di kota Palembang tentang arti politik setidaknya memperlihatkan hal yang menarik untuk dianalisis. Kiai, ustadz atau santri, mungkin memiliki pandangan yang tidak sama tentang suatu ayat; terlebih ayat yang berkaitan dengan politik. Pandangan terhadap

ayat politik ini bisa saja bersifat subjektif. Atau bisa berubah seiring dengan proses pengetahuan kiayi, uistadz atau santri itu sendiri.

Di kalangan kiayi atau ustadz, wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan (imam, khalifah atau ulul amri), konsep musyawarah atau demokrasi, keadilan dan persamaan. Tema-tema itu diajukan melalui ayat al-quran yang berkaitan. Sehingga didapat jawaban dari para kiayi, ustadz atau santri tentang “tafsir” ayat-ayat tersebut; yang kemudian menjadi wacana tersendiri untuk diteliti.

Wawancara kepada kiayi atau ustadz, dilakukan kepada **Ust. Abdul Lathif**, pengajar dari pesantren **Muqimius Sunnah**. Dalam pandangannya tentang arti politik, Ust. Abdul Lathif mengatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan ketatatnegaraan. Dengan arti ini, menurutnya arti politik identik dengan kekuasaan. Bahkan ia mengakui bahwa di dalam al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang politik atau kekuasaan.

Menurut Ust. Abdul Lathif juga, konsep seperti *imam*, *khalifah* atau *ulil amri* yang terdapat di dalam al-Quran dapat diartikan dengan pemimpin; tetapi tidak dapat diartikan seperti “presiden”. Menurutnya arti pemimpin itu luas dan tidak hanya ditujukan kepada kata presiden. Dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan bahwa “Allah akan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah”, maka diartikan oleh Ust. Abdul Lathif sebagai tugas manusia untuk menjalankan hukum atau peraturan Allah. Dan tugas ini merupakan “ujian” bagi manusia; apakah mereka bisa atau tidak menjalankannya.

Istilah “khalifah” yang dipakai pada kata “Khalifah Abubakar“, difahami oleh Ust. Abdul Lathif bahwa kata khalifah pada saat itu berarti

pengganti Nabi. Hanya saja memang Abbakar, Umar atau Ali adalah mereka yang menjadi pengganti Nabi dalam memimpin umat Islam. Tetapi jika dikaitkan apakah umat Islam saat ini membutuhkan seorang khalifah atau system kekhilafahan, maka hal itu belum perlu disebabkan Negara Indonesia yang multicultural dan heterogen.

Begitu juga ketika ditanya maksud QS. Al-Nisa ayat 59 yang mengharuskan kita taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri; menurut pengajar di Muqim Sunnah ini, arti *ulil amri* dimaksudkan sebagai orang yang memegang kekuasaan sebagaimana ada dalam hadis “hormatilah dan taatilah pemimpinmu selama ia tidak melakukan kezaliman”. Bagi Ust. Abdul Lathif, ulil amri juga sama dengan pemegang kekuasaan atau para pejabat. Ketaatan kepada ulil amri sama dengan ketaatan kepada Allah dan rasul. Jika ulil amri adalah presiden maka ketaatan kepada presiden juga menjadi wajib karena memang sudah diperintah oleh Allah. Oleh karena itu, membentuk kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang mesti. Karena tanpa pemimpin maka suatu kelompok menjadi terbelah. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dan memilih pemimpin yang baik.

Istilah wali atau auliya sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 52 diartikan Ust. Abdul Lathif sebagai pemimpin. Dengan demikian menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai wali atau pemimpin adalah sesuatu yang dilarang al-Quran. Ust. Abdul Lathif mendasari pandangannya berdasarkan riwayat Ibn Ishak, Ibn Jabir, Ibn Hatim dan al-Baihaqi; dari Ubadah bintu Samit. Tetapi menurutnya, jika dilihat dari sudut demokrasi, menjadikan pemimpin dari kalangan non-muslim tidak apa-apa dan tidak membuat kita menjadi bagian dari mereka.

Mengenai masalah musyawarah, Ust. Abdul Lathif juga mengatakan bahwa musyawarah itu tidak sama dengan demokrasi. Justru menurutnya,

musyawarahlah yang dapat menghasilkan hal-hal yang bersifat demokrasi. Secara teknis musyawarah adalah kebebasan berpendapat dimana seseorang berhak mengeluarkan pendapatnya. Tetapi pendapat itu harus diarahkan dan disesuaikan demi kepentingan bersama. Karena itu, Ust. Abdul Lathif setuju dengan ayat yang menyuruh bermusyawarah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya.

Pertanyaan juga diarahkan kepada ciri-ciri Negara yang adil, yang menurut Ust. Abdul Lathif harus memiliki kebijakan yang konsisten; tidak ada rakyat yang dirugikan atau ditindas; dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Baginya, perbuatan yang adil adalah salah satu ciri seorang pemimpin yang sesuai dengan perintah Allah, terutama dengan tidak melakukan kezaliman sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, “Berbuat adil-lah, karena ia mendekati kepada ketakwaan”.

Berkaitan dengan persoalan perbedaan atau perselisihan di kalangan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah politik; menurut Ust. Abdul Lathif sebenarnya masalah ini dapat diantisipasi oleh Negara terutama dengan cara melakukan musyawarah yang melibatkan para ulama dan pemuka agama untuk membuat suatu keputusan yang benar. Di sinilah peran pemerintah yang harus diperhatikan.

Wawancara juga dilakukan kepada **Ustz. Iranda Sofriani**, pengajar di pondok pesantren **al-Rahmah** di bilangan Plaju, Palembang. Ditanya tentang arti politik, menurutnya adalah berdemokrasi untuk kepentingan bersama membentuk Negara. Politik tidak sama dengan kekuasaan, karena politik dikembangkan dalam praktek keagamaan yang mengedepankan kemanusiaan bukan kekuasaan.

Istilah imam, khalifah atau ulil amri semuanya berarti pemimpin, khususnya pemimpin bagi orang beriman. Allah menjadikan manusia



sebagai khalifah di bumi dalam artian bahwa semua manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dengan menjalankan perbuatan yang baik kepada Allah. Istilah khalifah ini juga sama dengan istilah pada kata “khalifah” Abubakar atau Umar yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Tetapi menurutnya, umat Islam saat ini tidak harus mempunyai khalifah karena pada dasarnya al-Quran dan hadis sendiri tidak menyebut secara eksplisit tentang system khalifah.

Khusus masalah ulil amri, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 59 yang menyebutkan bahwa orang beriman wajib patuh kepada Allah, Rasul dan ulil amri, menurut pengajar ini maksudnya adalah kepatuhan kepada mereka sesuai dengan pedoman dari Allah. Ulil amri dalam ayat ini adalah mereka yang menjadi pemimpin kaum muslim yang tidak kafir kepada Allah dan tidak melakukan sesuatu yang merusak keislaman mereka. Ulil amri dengan demikian adalah tidak sama dengan presiden atau pemerintah. Ketaatan kepada ulil amri sama dengan ketaatan kepada Allah dan rasul. Sekalipun mereka dipilih secara demokrasi, maka kepatuhan kepada mereka juga berlaku sama. Ayat tentang kepatuhan kepada ulil amri inilah yang menjadi dasar bagi wajibnya membentuk suatu kepemimpinan.

Berkaitan dengan masalah wali atau aulioya, yang berarti pemimpin; maka QS. Al-Maidah ayat 52 diartikan oleh Ustz Sofiani ini dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadikan orang non muslim sebagai pemimpin. Tetapi ia tidak melihat bahwa orang yang menjadikan non muslim sebagai pemimpinnya sebagai bagian dari kaum non muslim itu sendiri.

Dalam hal musyawarah, yang ada dalam perintah QS. Ali Imran ayat 159, Ustz. Sofiani juga mengatakan bahwa perintah ini berarti menyuruh kita untuk melakukan musyawarah untuk membahas masalah-masalah yang

ada. Sekalipun musyawarah tidak sama dengan demokrasi, bagi pengajar ini musyawarah adalah berunding atau berembuk; sedangkan demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada warganya untuk menyuarakan pendapatnya.

Salah satu masalah penting yang ditanyakan kepada Ustz. Sofiani adalah tentang perselisihan yang terjadi pada masyarakat muslim, khususnya berkaitan dengan politik. Menurutnya, masalah itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Wawancara juga dilakukan kepada **Muhammad Darman al-Hakim**, salah satu pengajar di pondok pesantren **Muqimus Sunnah**. Ketika ditanya tentang arti politik, ia menjawab bahwa politik itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara. Politik menurutnya juga tidak sama dengan kekuasaan; sebab kekuasaan berkaitan dengan kewenangan untuk mempengaruhi orang lain seperti halnya presiden atau gubernur. Masalah politik diyakini ada di dalam al-Quran seperti konsep tentang musyawarah.

Ketika ditanya tentang makna imam, khalifah atau ulil amri, ustadz ini juga mengatakan bahwa tiga istilah ini tidak sama dengan istilah presiden. Istilah presiden menurutnya adalah istilah yang muncul pada masa sekarang; sedangkan khalifah muncul pada masa lalu di tanah Arab. Istilah khalifah untuk manusia di bumi, ia artikan dengan kedudukan manusia yang diberikan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Dikaitkan dengan artinya sebagai *pemimpin*, seperti halnya khalifah Abubakar atau Ali, kedudukan manusia sebagai khalifah karena aspek pemerintahan yang dilakukan dengan system musyawarah. Keharusan adanya khalifah diakuinya karena inti ajaran Islam yang membawa perdamaian akan terwujud jika manusia memiliki khalifah.

Dalam QS. Al-Nisa ayat 59 yang menyebutkan bahwa manusia harus taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri, menurut Ust. Darman bahwa ulil amri yang harus ditaati itu adalah para pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Pemimpin inilah yang disebut dengan khalifah. Ulil Amri tidak sama dengan presiden. Ketaatan kepada ulil amri tidak bersifat mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jika ulil amri jujur dan adil maka wajib ditaati dan dipatuhi. Ayat ini juga difahaminya tidak berarti bahwa membentuk suatu kepemimpinan itu adalah mutlak dan wajib. Tetapi bagi Ust. Darman, membentuk kepemimpinan atau memilih seorang pemimpin tidak boleh dari orang kafir sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 52.

Berkaitan dengan kata wali atau auliya, yang dalam QS. Al-Maidah ayat 52 ada larangan menjadikannya dari kalangan yahudi atau Nasrani, menurut Ust. Darman hal ini karena keberadaan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dan karena orang muslim adalah yang terbaik, maka inilah yang menjadi alasan pemimpin harus dari kalangan Islam.

Pada tema tentang musyawarah sebagaimana dalam QS. Ali Imron ayat 159, dimaksudkan bahwa kita umat Nabi Muhammad harus memiliki suatu sifat untuk dapat bermusyawarah jika ada masalah bersama. Allah memerintahkan bermusyawarah dalam arti berkata yang lemah lembut. Disamping itu, pertanyaan tentang konsep keadilan, maka menurut Ust. Darman bahwa perintah Allah untuk kita berbuat adil adalah merupakan indikator dari bentuk keadilan kepada Allah. Bahkan Negara yang adil itu dapat terwujud jika dalam keputusannya tidak didasari atas kepentingan pribadi.

Jika ada perselisihan yang muncul dalam masyarakat, khususnya pada masalah politik, maka menurut Ust. Darman, perselisihan itu harus

dikembalikan kepada hukum Allah. Maksudnya adalah dengan menjadikan hukum Allah sebagai pedoman, seperti perintah untuk bermusyawarah, maka perselisihan itu akan dapat diatasi. Selanjutnya, persaudaraan sesama muslim yang memang sudah terjalin, dapat kembali diwujudkan secara bersama. Selain itu Negara juga perlu menjadikan konsep *amar makruf* dan *nahi munkar* dengan cara memilih pemimpin yang juga beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan kriteria seperti ini, maka akan tercipta kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Wawancara juga penulis dilakukan kepada **Muhammad Aditya Ahmad** (19th) yang menjadi santri di pondok pesantren Izzatuna Palembang. Menurut Aditya, yang dimaksud dengan politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berbentuk proses pembuatan keputusan. Atau bisa juga disebut dengan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Tetapi menurutnya, politik itu tidak sama dengan kekuasaan; karena kekuasaan merupakan hal yang sama dengan kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Di dalam al-Quran, aditya mengakui bahwa memang ada ayat-ayat yang berbicara tentang politik; misalnya QS. An-Nahl 90-91; al-Syuro; 38; dan lain-lain.

Menurut Aditya juga, ayat-ayat yang ada di dalam al-Quran yang menyebut tentang imam, khalifah atau ulil amri; yang artinya “pemimpin” dapat saja disamakan artinya dengan istilah “presiden”. Sebab baginya, pemimpin atau presiden adalah orang yang memiliki kecakapan atau kelebihan dalam mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang diinginkan.

Pada ayat yang berbicara tentang “*Manusia itu adalah khalifah di muka bumi*”; maka menurutnya itu artinya adalah bahwa manusia yang diberikan hak hidup di bumi adalah untuk mengabdikan kepadanya; yang dalam rangka pengabdian ini manusia diberikan kewajiban atau taklif. Ia juga menambahkan bahwa khalifah itu juga artinya sama dengan pemimpin; dalam arti kata khalifah Abubakar atau Umar. Bahkan umat Islam saat ini menurutnya memang harus memiliki khalifah sebagai pengganti Nabi dalam memimpin dan membimbing umat dalam urusan administrasi kenegaraan, moral atau agama.

Menurutnya, maksud ayat “*taatilah Allah, rasulnya dan ulil amri...*” adalah kita wajib berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis meskipun tidak terdapat perintah yang secara persis. Yang dimaksud dengan ulil amri pada ayat itu adalah para pemimpin yang mengikuti ketaatan kepada rasul; yaitu bisa saja para pemimpin di antara kita. Menurut Aditya juga, ulil amri itu tidak sama dengan istilah khalifah atau presiden. Sebab ulil amri itu adalah para imam atau penguasa, hakim dan bisa saja kita semua yang memiliki kekuasaan yang secara syar’i; bukan kekuasaan secara thoghut. Bahkan, kita tidak boleh hanya taat kepada Allah dan rasul saja; harus juga taat kepada ulil amri.

Menurut Aditya, hal ini karena ulil amri itu adalah pemimpin yang berada di antara kita seperti wali Allah dan rasul yang membimbing dan mendidik manusia dalam urusan agama. Menurut Aditya juga, seandainya ulil amri itu adalah presiden yang dipilih secara demokrasi, maka kita wajib patuh kepadanya; karena hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama yang tidak memperbolehkan para pemimpin memberontak ulil amri sekalipun mereka berbuat zalim. Karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa membentuk kepemimpinan itu hukumnya wajib. Begitu juga maksud QS.

Al-Maidah 52 bahwa “orang islam tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali/auliya” adalah larangan menjadikan orang-orang non muslim sebagai pemimpin sehingga mengesampingkan orang muslim lainnya. Menurut Aditya, kita boleh saja menjadikan non muslim sebagai pemimpin karena (berdasarkan pendapat Ibn Taymiyah) jika mereka berlaku adil; dan kita juga tidak boleh menjadikan non muslim sebagai pemimpin jika mereka menunjukkan permusuhan kepada islam. Lebih jauh, menurut Aditya, jika kita menjadikan mereka sebagai pemimpin maka kita tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok mereka.

Pada QS Ali Imron 159 yang berkaitan dengan musyawarah, maka menurut Aditya, ayat ini memang menjadi dasar disyariatkannya musyawarah sebagai jalan dalam melakukan pembicaraan kepada orang lain. Musyawarah menurutnya tidak sama dengan demokrasi. Sebab demokrasi adalah menghasilkan keputusan dalam menetapkan pihak yang memenangkan pemilihan. Musyawarah sama artinya dengan bebas berpendapat. Pada ayat, “dan berlaku adillah karena ia dekat dengan ketakwaan” maksudnya adalah Allah menyuruh berlaku adil kepada siapapun baik kawan atau lawan sebagai factor dalam ketakwaan kita. Menurut Aditya, Negara yang adil itu cirinya adalah (1) tegaknya hokum yang menjunjung keadilan tanpa ada diskriminasi; (2) terwujudnya institusi aparat dan hokum yang bersih dan professional; (3) terwujudnya penegakan HAM; (4) terwujudnya keadilan gender; (4) terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hokum.

Ketika ditanya ayat yang mengatakan bahwa “jika kalian berselisih maka kembalikan hukumnya kepada Allah”, menurut Aditya, maka ini adalah konsekwensi dari iman kepada Allah dan Rasul yang harus diterima. Tetapi ketika ditanya tentang masalah politik di Indonesia saat ini, maka

menurut Aditya, tidak semua masalahnya harus dikembalikan kepada hokum Allah; sebab Negara Indonesia adalah negarah hokum yang memiliki ragam agama. Menurut Aditya, maksud “sesungguhnya mukmin itu bersaudara” adalah mereka bersaudara dalam keimanan karena agama yang sama. Dalam rangka itu, Negara harus mendamaikan perselisihan di kalangan umat dengan cara: (1) membangun dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat; (2) adanya kepastian dan penegakan hokum; (3) partisipasi dan dukungan dari semua pihak untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera.

**Imam Muttaqin** (19<sup>th</sup>) yang menjadi santri di pondok pesantren Izzatuna, Palembang juga memberikan informasi tentang masalah politik. Menurutny, yang dimaksud dengan politik itu adalah mengelola, mengatur, memerintah atau melarang. Politik juga menurutnya sama artinya dengan kekuasaan untuk memerintah. Dan di dalam al-Quran, Imam Muttaqin mengakui bahwa memang terdapat ayat-ayat yang menjelaskan masalah politik seperti dalam QS. al-Nahl ayat 90-91.

Berkaitan dengan istilah *imam*, *khalifah* atau *ulil amri* yang diartikan sebagai pemimpin, menurut Imam Muttakin juga dapat disamakan dengan istilah *presiden*. Presiden atau kepala daerah dapat disebut dengan *ulil amri*; karena mereka adalah orang yang memimpin suatu kelompok. Pada QS. al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, “*Dan Kami jadikan khalifah di bumi...*”, maka *khalifah* itu dapat diartikan sebagai Nabi Adam yang menjadi penerus bagi malaikat. Bagi Imam Muttaqin, istilah *khalifah* pada masa pemerintahan Abubakar, Umar, Usman atau Ali juga dapat diartikan dengan pemimpin. Dan idealnya, pada saat ini umat Islam sangat membutuhkan adanya seorang khalifah sebagai lembaga yang berwenang mengatur

kehidupan umat Islam, baik menyangkut masalah shalat, puasa dan amal ibadah lain, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.

Jika dihubungkan dengan QS. Al-Nisa ayat 59 yang berbunyi, “*Patuhilah Allah, Rasul dan ulil amri diantara kalian...*”, maka maksudnya menurut Imam Muttaqin adalah kepatuhan umat Islam kepada *ulil amri* itu sudah menjadi kewajiban; dengan syarat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh al-Quran dan sunnah Nabi. Yang menarik, *ulil amri* ini menurut Imam Muttaqin, bukan hanya ditujukan kepada seorang presiden tetapi juga kepada semua orang yang menjadi pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk itulah ia menyamakan istilah *ulil amri* dengan presiden, khalifah atau pemimpin secara umum. Kepatuhan kepada *ulil amri* inilah yang menjadi kewajiban kepada semua umat Islam sepanjang pemerintahnya sesuai dengan syariat Islam. Termasuk kewajiban ini adalah kepada pemimpin yang dipilih secara demokrasi seperti pada proses pemilihan umum. Imam mencontohkan, bahwa di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pemimpin yang memerintah dengan sempurna sesuai dengan syariat Islam. Atas dasar kepatuhan kepada pemimpin seperti inilah, maka membentuk kepemimpinan itu hukumnya wajib.

Deskripsi yang dikaitkan dengan QS. Al-Maidah ayat 52 yang mengatakan bahwa orang beriman tidak boleh mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali atau pemimpin, dikatakan oleh Imam Muttaqin bahwa orang Islam memang tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin karena nanti akan dianggap sebagai orang yang telah melepaskan dirinya dengan agama Allah. Dalam konsep Negara Indonesia, orang Islam juga tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, dan masalah ini sebenarnya sudah disepakati oleh para ulama. Jika tidak maka umat Islam akan dianggap sebagai bagian dari orang kafir tersebut.



Sehubungan dengan masalah musyawarah sebagaimana QS. Ali Imron ayat 159, menurut Imam Muttaqin, Islam memang menerapkan musyawarah dalam sistem pemerintahan; bahkan Rasul sendiri bermusyawarah dalam pemerintahannya. Musyawarah dapat disamakan dengan istilah demokrasi, yang sering diterjemahkan menjadi kebebasan berpendapat. Melalui musyawarah inilah maka akan dihasilkan akhlak yang baik yaitu sifat memaafkan sesama manusia.

Imam Muttaqin juga mengatakan bahwa ciri-ciri Negara yang adil itu adalah jika Negara mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Berdasarkan QS.... yang berbunyi, *“sesungguhnya Allah itu memerintah kepada keadilan, kebaikan dan menunaikan hak keluarga serta melarang kepada perbuatan inkar”*, maka dalam konsep Negara, ayat ini sebenarnya dapat dipakai dengan cara Negara harus membuat keputusan atau peraturan yang mensejahterakan rakyatnya demi tercipta rasa aman dan damai. Oleh karena itu, ketika ada perselisihan umat, maka menurut Imam Muttaqin harus kembali kepada al-Quran dan hadis; terutama melalui peran para ulama yang memang menguasai ilmu-ilmu al-Quran dan hadis.

Begitu juga di kalangan santri, politik difahami sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk memerintah kepada suatu kelompok masyarakat; yang dengan kewenangan ini maka politik dapat membuat suatu aturan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

**Ilham Akbar** (20th), santri yang berasal dari pesantren Muqimus Sunnah mengatakan bahwa arti politik itu adalah orang yang bermain di belakang layar; dan politik seperti ini dapat disamakan dengan kekuasaan. Ilham tidak menolak untuk mengatakan bahwa di dalam al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang bercerita tentang masalah politik. Sekalipun Ilham tidak memberikan contoh ayat politik seperti apa yang ada di dalam al-

Quran. Bagi Ilham Akbar, seorang presiden yang menjadi pemimpin suatu bangsa, secara istilah dapat disebut dengan *imam*, *khalifah* atau *ulul amri*. Tiga istilah ini, yang berbeda penggunaan ayatnya dalam al-Quran, dapat diartikan dengan “pemimpin”. Khusus arti kata *khalifah*, jika digunakan seperti kata “Khalifah Abubakar” atau “Khalifah Umar”, maka artinya adalah presiden. Tetapi ketika ditanya tentang ayat bahwa “*Allah menjadikan khalifah di muka bumi...*”, tidak ada jawaban yang diberikan oleh Ilham Akbar sekalipun ia mengakui bahwa umat Islam saat ini harus mempunyai khalifah.

Selain kata ‘*khalifah*’, kata ‘*ulil amri*’ pada QS. Al-Nisa; 59 juga dapat diartikan dengan ‘presiden’. Menarik, ketika kata *ulil amri* dikaitkan dalam konteks kepatuhan kepada Allah dan Rasul, menurut Ilham Ikbal, kita tidak harus patuh kepadanya; apalagi jika dikaitkan dengan system demokrasi dalam pemilihannya. Dengan kata lain, pada QS. Al-Nisa; 59 ini, kata *ulil amri* diterima secara tekstual, tapi tidak diterima secara factual; kecuali hanya sebatas kewajiban membentuk kepemimpinan saja. Bahkan dalam QS. Al-Maidah; 59, yang menyebutkan bahwa “*janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali diantara kalian...*”, maka menurut Ilham Akbar kita tidak boleh menjadikan orang non muslim sebagai pemimpin karena akibatnya kita akan menjadi bagian dari kelompok mereka.

Ketika ditanya tentang arti ‘*musyawarah*’ sebagaimana yang ada dalam ayat al-Quran, Ikbal mengatakan bahwa arti ‘*musyawarah*’ itu adalah bebas berpendapat yang sama maksudnya dengan kata ‘demokrasi’. Selain itu, Ikbal juga mengakui bahwa setiap orang yang beriman itu sebenarnya adalah bersaudara (QS. Al-Hujurat; 10). Tetapi ketika ditanyakan tentang

apa yang harus dilakukan oleh Negara ketika terjadi perselisihan di antara sesama muslim, Iqbal tidak mendeskripsikannya.

Wawancara juga penulis dilakukan kepada **Muhammad Aditya Ahmad** (19th) yang menjadi santri di pondok pesantren Izzatuna Palembang. Menurut Aditya, yang dimaksud dengan politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berbentuk proses pembuatan keputusan. Atau bisa juga disebut dengan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Tetapi menurutnya, politik itu tidak sama dengan kekuasaan; karena kekuasaan merupakan hal yang sama dengan kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Di dalam al-Quran, aditya mengakui bahwa memang ada ayat-ayat yang berbicara tentang politik; misalnya QS. An-Nahl 90-91; al-Syuro; 38; dan lain-lain.

Menurut Aditya juga, ayat-ayat yang ada di dalam al-Quran yang menyebut tentang imam, khalifah atau ulil amri; yang artinya “pemimpin” dapat saja disamakan artinya dengan istilah “presiden”. Sebab baginya, pemimpin atau presiden adalah orang yang memiliki kecakapan atau kelebihan dalam mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang diinginkan.

Pada ayat yang berbicara tentang “*Manusia itu adalah khalifah di muka bumi*”; maka menurutnya itu artinya adalah bahwa manusia yang diberikan hak hidup di bumi adalah untuk mengabdikan kepadanya; yang dalam rangka pengabdian ini manusia diberikan kewajiban atau taklif. Ia juga menambahkan bahwa khalifah itu juga artinya sama dengan pemimpin; dalam arti kata khalifah Abubakar atau Umar. Bahkan umat Islam saat ini menurutnya memang harus memiliki khalifah sebagai pengganti Nabi dalam

memimpin dan membimbing umat dalam urusan administrasi kenegaraan, moral atau agama.

Menurutnya, maksud ayat “taatilah Allah, rasulnya dan ulil amri...” adalah kita wajib berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis meskipun tidak terdapat perintah yang secara persis. Yang dimaksud dengan ulil amri pada ayat itu adalah para pemimpin yang mengikuti ketaatan kepada rasul; yaitu bisa saja para pemimpin di antara kita. Menurut Aditya juga, ulil amri itu tidak sama dengan istilah khalifah atau presiden. Sebab ulil amri itu adalah para imam atau penguasa, hakim dan bisa saja kita semua yang memiliki kekuasaan yang secara syar’i; bukan kekuasaan secara thoghut. Bahkan, kita tidak boleh hanya taat kepada Allah dan rasul saja; harus juga taat kepada ulil amri.

Menurut Aditya, hal ini karena ulil amri itu adalah pemimpin yang berada di antara kita seperti wali allah dan rasul yang membimbing dan mendidik manusia dalam urusan agama. Menurut Aditya juga, seandainya ulil amri itu adalah presiden yang dipilih secara demokrasi, maka kita wajib patuh kepadanya; karena hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama yang tidak memperbolehkan para pemimpin memberontak ulil amri sekalipun mereka berbuat zalim. Karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa membentuk kepemimpinan itu hukumnya wajib. Begitu juga maksud QS. Al-Maidah 52 bahwa “orang islam tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali/auliya” adalah larangan menjadikan orang-orang non muslim sebagai pemimpin sehingga mengesampingkan orang muslim lainnya. Menurut Aditya, kita boleh saja menjadikan non muslim sebagai pemimpin karena (berdasarkan pendapat Ibn Taymiyah) jika mereka berlaku adil; dan kita juga tidak boleh menjadikan non muslim sebagai pemimpin jika mereka menunjukkan permusuhan kepada islam. Lebih jauh, menurut Aditya, jika

kita menjadikan mereka sebagai pemimpin maka kita tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok mereka.

Pada QS Ali Imron 159 yang berkaitan dengan musyawarah, maka menurut Aditya, ayat ini memang menjadi dasar disyariatkannya musyawarah sebagai jalan dalam melakukan pembicaraan kepada orang lain. Musyawarah menurutnya tidak sama dengan demokrasi. Sebab demokrasi adalah menghasilkan keputusan dalam menetapkan pihak yang memenangkan pemilihan. Musyawarah sama artinya dengan bebas berpendapat. Pada ayat, “dan berlaku adillah karena ia dekat dengan ketakwaan” maksudnya adalah Allah menyuruh berlaku adil kepada siapapun baik kawan atau lawan sebagai factor dalam ketakwaan kita. Menurut Aditya, Negara yang adil itu cirinya adalah (1) tegaknya hokum yang menjunjung keadilan tanpa ada diskriminasi; (2) terwujudnya institusi aparat dan hokum yang bersih dan professional; (3) terwujudnya penegakan HAM; (4) terwujudnya keadilan gender; (4) terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hokum.

Ketika ditanya ayat yang mengatakan bahwa “jika kalian berselisih maka kembalikan hukumnya kepada Allah”, menurut Aditya, maka ini adalah konsekwensi dari iman kepada Allah dan Rasul yang harus diterima. Tetapi ketika ditanya tentang masalah politik di Indonesia saat ini, maka menurut Aditya, tidak semua masalahnya harus dikembalikan kepada hokum Allah; sebab Negara Indonesia adalah negarah hokum yang memiliki ragam agama. Menurut Aditya, maksud “sesungguhnya mukmin itu bersaudara” adalah mereka bersaudara dalam keimanan karena agama yang sama. Dalam rangka itu, Negara harus mendamaikan perselisihan di kalangan umat dengan cara: (1) membangun dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat; (2) adanya kepastian dan penegakan hokum; (3)

partisipasi dan dukungan dari semua pihak untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera.

**Imam Muttaqin** (19<sup>th</sup>) yang menjadi santri di pondok pesantren Izzatuna, Palembang juga memberikan informasi tentang masalah politik. Menurutnya, yang dimaksud dengan politik itu adalah mengelola, mengatur, memerintah atau melarang. Politik juga menurutnya sama artinya dengan kekuasaan untuk memerintah. Dan di dalam al-Quran, Imam Muttaqin mengakui bahwa memang terdapat ayat-ayat yang menjelaskan masalah politik seperti dalam QS. al-Nahl ayat 90-91.

Berkaitan dengan istilah *imam*, *khalifah* atau *ulil amri* yang diartikan sebagai pemimpin, menurut Imam Muttakin juga dapat disamakan dengan istilah *presiden*. Presiden atau kepala daerah dapat disebut dengan *ulil amri*; karena mereka adalah orang yang memimpin suatu kelompok. Pada QS. al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, “*Dan Kami jadikan khalifah di bumi...*”, maka *khalifah* itu dapat diartikan sebagai Nabi Adam yang menjadi penerus bagi malaikat. Bagi Imam Muttaqin, istilah *khalifah* pada masa pemerintahan Abubakar, Umar, Usman atau Ali juga dapat diartikan dengan pemimpin. Dan idealnya, pada saat ini umat Islam sangat membutuhkan adanya seorang khalifah sebagai lembaga yang berwenang mengatur kehidupan umat Islam, baik menyangkut masalah shalat, puasa dan amal ibadah lain, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.

Jika dihubungkan dengan QS. Al-Nisa ayat 59 yang berbunyi, “*Patuhilah Allah, Rasul dan ulil amri diantara kalian...*”, maka maksudnya menurut Imam Muttaqin adalah kepatuhan umat Islam kepada *ulil amri* itu sudah menjadi kewajiban; dengan syarat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh al-Quran dan sunnah Nabi. Yang menarik, *ulil amri* ini menurut Imam Muttaqin, bukan hanya ditujukan kepada seorang presiden

tetapi juga kepada semua orang yang menjadi pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk itulah ia menyamakan istilah *ulil amri* dengan presiden, khalifah atau pemimpin secara umum. Kepatuhan kepada *ulil amri* inilah yang menjadi kewajiban kepada semua umat Islam sepanjang pemerintahnya sesuai dengan syariat Islam. Termasuk kewajiban ini adalah kepada pemimpin yang dipilih secara demokrasi seperti pada proses pemilihan umum. Imam mencontohkan, bahwa di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pemimpin yang memerintah dengan sempurna sesuai dengan syariat Islam. Atas dasar kepatuhan kepada pemimpin seperti inilah, maka membentuk kepemimpinan itu hukumnya wajib.

Deskripsi yang dikaitkan dengan QS. Al-Maidah ayat 52 yang mengatakan bahwa orang beriman tidak boleh mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali atau pemimpin, dikatakan oleh Imam Muttaqin bahwa orang Islam memang tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin karena nanti akan dianggap sebagai orang yang telah melepaskan dirinya dengan agama Allah. Dalam konsep Negara Indonesia, orang Islam juga tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, dan masalah ini sebenarnya sudah disepakati oleh para ulama. Jika tidak maka umat Islam akan dianggap sebagai bagian dari orang kafir tersebut.

Sehubungan dengan masalah musyawarah sebagaimana QS. Ali Imron ayat 159, menurut Imam Muttaqin, Islam memang menerapkan musyawarah dalam sistem pemerintahan; bahkan Rasul sendiri bermusyawarah dalam pemerintahannya. Musyawarah dapat disamakan dengan istilah demokrasi, yang sering diterjemahkan menjadi kebebasan berpendapat. Melalui musyawarah inilah maka akan dihasilkan akhlak yang baik yaitu sifat memaafkan sesama manusia.

Imam Muttaqin juga mengatakan bahwa ciri-ciri Negara yang adil itu adalah jika Negara mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Berdasarkan QS.... yang berbunyi, “*sesungguhnya Allah itu memerintah kepada keadilan, kebaikan dan menunaikan hak keluarga serta melarang kepada perbuatan inkar*”, maka dalam konsep Negara, ayat ini sebenarnya dapat dipakai dengan cara Negara harus membuat keputusan atau peraturan yang mensejahterakan rakyatnya demi tercipta rasa aman dan damai. Oleh karena itu, ketika ada perselisihan umat, maka menurut Imam Muttaqin harus kembali kepada al-Quran dan hadis; terutama melalui peran para ulama yang memang menguasai ilmu-ilmu al-Quran dan hadis.

Mahasiswa yang bernama **Siti Sarah** (21 th) yang berasal dari Diniyah Putri Pesantren Muqimus Sunnah, mengartikan bahwa politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Politik juga ia samakan maknanya dengan kekuasaan. Dan di dalam al-Quran diakuinya ada ayat-ayat yang berbicara tentang politik.

Menurut Siti Sarah, imam, khalifah atau ulil amri itu jika artinya pemimpin maka sama saja dengan presiden. Dihubungkan dengan al-Quran yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, maka arti khalifah ini sama pada kata khalifah abubakar atau umar. Sekalipun menurutnya umat Islam saat ini tidak harus memiliki khalifah disebabkan karena beberapa Negara tidak menjadi Negara Islam. Ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana QS. An-Nisa 59, “*taatilah allah, rasul dan ulil amri*” dimaksudkan adalah nabi Muhammad. Tetapi jika arti ulil amri itu adalah presiden maka kita wajib patuh kepadanya; hanya saja taat kepada Allah dan rasul harus dilengkapi dengan taat kepada ulil amri karena dialah yang memimpin suatu wilayah.



Dalam QS. An-Nisa 59, menurut Siti Sarah, dia setuju bahwa bahwa membentuk kepemimpinan bagi umat Islam itu wajib. Bahkan dalam QS. Al-Maidah 52, pemimpin itu wajib dari orang muslim. Jadi, katanya, kita tidak boleh menjadikan pemimpin dari kalangan non muslim karena Negara Indonesia adalah mayoritas penduduknya Islam.

Berkaitan dengan masalah musyawarah yang terdapat dalam QS. Ali Imron 159, menurut Siti Sarah bahwa arti kata musyawarah itu adalah memutuskan sesuatu masalah dengan berkompromi. Bahkan lebih luas musyawarah itu sama saja dengan demokrasi atau bebas berpendapat.

Pada ayat “dan berlaku adillah maka itu mendekatkan kepada takwa...” menurut Siti Sarah menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu harus bersikap adil. Negara yang adil dicirikan dengan Negara yang mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menurut Siti Sarah, ayat “*sesungguhnya Allah memerintah kepada keadilan dan ihsan....*” Maksudnya adalah bahwa Allah menyeru kepada kebaikan dan melarang kita membuat kejahatan. Ayat ini dapat dipakai Negara dengan cara membuat kebijakan atau peraturan yang mensejahterakan rakyatnya agar Negara menjadi aman. Sedangkan ayat “*dan apa yang kalian selisihkan maka kembalikan hukumnya kepada Allah...*” menunjukkan bahwa jika kita tidak menemukan jalan keluar dari suatu perselisihan maka kembalikan kepada al-Quran. Begitu juga pada QS. Al-Hujurat ayat 10 menunjukkan bahwa persaudaraan sesama muslim itu dalam bentuk saling mengasihi. Jika ada perselisihan sesama muslim di Negara kita maka Negara harus mendamaikannya dengan cara mengambil jalan tengah dan mencari cara yang damai.

Dari hasil wawancara dengan **Munir** (23th) santri dai pondok pesantren Rubath al-Muhibbin Palembang, didapatkan informasi bahwa menurutnya politik adalah suatu cara untuk merencanakan suatu anjuran demi

mencapai tujuan. Politik tidak berbeda dengan kekuasaan yaitu sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Munir juga tidak menolak bahwa di dalam al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang politik. Dikaitkan dengan istilah imam, khalifah atau ulil amri; seorang pemimpin dapat disebut dengan presiden karena amanah yang diberikan kepadanya adalah untuk memimpin Negara. Tetapi istilah khalifah pada ayat yang mengatakan bahwa Allah “menjadikan khalifah di muka bumi”, maka maksud khalifah itu adalah sebagai penjaga dan pelindung alam baik pepohonan atau hewan. Dikaitkan dengan istilah khalifah ABubakar atau khalifah Umar, arti khalifah di sini memang adalah pemimpin Negara. Keberadaan khalifah seperti ini memang perlu diwujudkan agar dapat mengatur manusia dan meminimalisir perselisihan di antara mereka.

Ketika ditanya tentang ketaatan kepada Allah dan rasul sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 59, bahwa yang dimaksud dengan kepatuhan ini adalah patuh kepada Allah dan Rasul dalam menjalankan perintah dan sunnahnya. Dengan demikian yang disebut ulil amri ini adalah Rasul dan sahabat. Tetapi istilah ulil amri tidak sama dengan khalifah. Bagi Munir, ulil amri adalah sifat yang ada pada perbuatan; sedangkan khalifah adalah gelar. Karena sifat itulah maka ulil amri dapat saja berubah dalam mengambil keputusannya dan dengan demikian tidak mutlak untuk dipatuhi. Kalau seandainya ulil amri adalah presiden, maka kepada presiden pun kita tidak mutlak mematuhi jika dalam keputusannya mengandung hal-hal yang negatif. Membentuk kepemimpinan itu dengan demikian menjadi wajib dilakukan, karena pada dasarnya setiap manusia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri.

QS. Al-Maidah 52 yang melarang menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai wali (pemimpin), maka menurut Munir, bahwa itu boleh

dilakukan jika tidak ada orang Islam lagi yang layak menjadi pemimpin. Orang Islam yang melakukan hal ini bisa saja nanti akan menjadi bagian dari orang Yahudi atau Nasrani. Begitu juga Qs. Ali Imron ayat 159 yang menyuruh kita melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan, disebut Munir kalau itu terjadi perselisihan. Musyawarah ini disamakan dengan demokrasi yang artinya bebas berpendapat.

Dalam tema keadilan, Negara yang dianggap sebagai Negara yang adil itu dicirikan dengan berbagai hal seperti jaminan untuk bebas berpendapat, pelaksanaan hokum yang sesuai dengan aturan dan keberpihakan kepada rakyat. Jika terjadi perselisihan maka diharuskan kembali kepada hokum Allah; artinya bahwa jika terjadi perselisihan secara politik maka jalan keluarnya harus dikembalikan kepada al-Quran dan hadis. Salah satunya dengan jalan musyawarah. Bahkan pada ayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan, kebaikan dan lain-lain, maka dimaksudkan agar manusia berlomba membantu sesama manusia terutama dalam meningkatkan kemajuan melalui kontribusi yang baik.

Hasil wawancara dengan **David Mubarak** (20<sup>th</sup>), santri dari ponpes Auliya Cendekia Palembang ini, mengatakan bahwa arti politik itu sama saja dengan kekuasaan. Dalam defenisinya, menurut David, politik adalah jika seseorang yang menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan pendapatnya untuk kemajuan bersama. Diakui bahwa masalah politik juga disebutkan di dalam al-Quran. Ayat-ayat yang berbicara tentang politik, terutama konsep-konsep seperti imam, khalifah atau ulil amri, menurut David, artinya sama saja dengan pemimpin; yang dalam bahasa politik kenegaraan disebut dengan presiden. Istilah presiden inilah yang sama dengan istilah 'khalifah' pada masa khalifah Abubakar atau Umar. Bahkan

menurutnya, umat Islam saat ini memang harus memiliki khalifah agar hidup mereka menjadi lebih terarah dan damai.

Ketika ditanya siapakah *ulil amri* itu, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 59, David tidak mengetahuinya. Bahkan apakah *ulil amri* itu artinya presiden, juga tidak mengetahuinya. Di samping itu, ketaatan kepada *ulil amri* yang ditanyakan apakah harus, menurutnya memang harus dipatuhi. Sebab presiden yang dipilih secara demokratis, sudah disepakati untuk kita patuhi. Begitu juga ketika ditanya tentang QS. Al-Maidah ayat 52 yang melarang kita mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali (pemimpin), David mengatakan bahwa memang yang harus menjadi pemimpin itu adalah orang Islam; dan kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin dengan alasan beda agama karena ditakutkan akan menjadi sama dengan mereka.

Dalam kaitannya dengan musyawarah, David juga mengakui bahwa segala hal memang harus dimusyawarahkan; karena musyawarah itu sama saja dengan demokrasi atau bebas berpendapat. Sebagai salah satu ciri Negara yang baik adalah memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Karena itu, ayat yang berbunyi, “berbuat adil-lah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan”, difahami bahwa keadilan itu sesuatu yang sangat baik. Dihubungkan dengan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat dan harus dikembalikan kepada Allah, bahwa menurutnya al-Quran menyuruh kita untuk kembali kepada hokum musyawarah dan kemudian berserah diri kepada-Nya. Jika perselisihan itu ada kaitannya dengan masalah politik, maka perselisihan itu sangat wajib dikembalikan kepada Allah dengan cara melihat aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam al-quran. Jika perselisihan itu terjadi sesama muslim, maka kita harus kembali kepada al-Quran sebagai pedoman kita. QS. Al-Hujurat yang

mengatakan bahwa orang Islam itu bersaudara, dikarenakan mereka berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Dalam kaitan dengan perintah Allah yang menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan (*ihsan*), maka ayat ini dapat dipakai dalam konsep Negara dengan cara membuat aturan-aturan yang sesuai dengan pedoman al-Quran demi kehidupan manusia.

Santri lain yang diwawancarai adalah **Agus Prayogo**, santri dari ponpes Aulia Cendekia. Agus mengatakan bahwa politik adalah merupakan sumber motivasi masyarakat Islam dalam berperan penting menumbuhkan perilaku dan sikap social. Dikaitkan dengan istilah imam atau khalifah yang ada di dalam ayat “sesungguhnya aku jadikan di bumi khalifah..” maka menurut Agus, khalifah pada ayat ini berarti gelar yang diberikan untuk manusia sebagai penerus nabi Muhammad dalam masalah kepemimpinan Islam. Menurutnya pemimpin adalah orang yang paling berkuasa atau orang yang bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa bertanggung jawab kepada rakyat. Kata pemimpin ini dapat disamakan dengan kata khalifah; seperti khalifah Abubakar. Dan saat ini, umat Islam memang harus memiliki khalifah sebagai pemimpin dan penerus tugas nabi. Pada istilah *ulil amri*, maka ketika ditanya apakah *ulil amri* itu sama dengan khalifah atau pemerintah; maka dijawab bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah setiap penguasa muslim yang secara diangkat sebagai pemimpin baik melalui aturan syariat atau tidak. Tetapi kita tidak harus taat kepada *ulil amri* dengan sebab ketaatan itu hanya untuk Allah yang maha Esa.

Masalah yang sangat penting dikatakan berkaitan dengan kepemimpinan non muslim. Menurut Agus, kita tidak boleh mengangkat orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin orang Islam karena mereka nanti setelah menjadi pemimpin, karena mereka akan meremehkan orang Islam sendiri. Jabatan pemimpin harus dari orang Islam. Karena itu orang

Islam tidak boleh menjadikan orang non muslim sebagai pemimpin. Tetapi jika kita menjadikan mereka sebagai pemimpin, kita tidak disebut sebagai bagian dari mereka karena masalah pemimpin berbeda dengan kita sebagai rakyat.

Ketika ditanya tentang musyawarah, maka artinya adalah usaha untuk mengambil suatu keputusan dengan baik. Musyawarah tidak sama dengan demokrasi; sebab musyawarah lebih berarti berunding, sedangkan demokrasi meruju kepada system pemerintahan. Musyawarah itu sama dengan bebas berpendapat yang juga ada dalam istilah berunding.

Dalam ayat yang mengatakan bahwa kita harus berbuat adil, maka arti adil adalah suatu sikap yang tidak melihat berat sebelah dan pilih kasih. Keadilan perlu ditegakkan oleh sebuah Negara. Maka Negara yang adil adalah Negara dengan ciri-ciri yaitu hokum yang dijunjung tinggi, penegakan HAM dan keadilan gender.

Pada kasus perselisihan yang terjadi akibat politik, menurut Agus, Jika kita berselisih tentang sesuatu, maka maksud dari kembali keada hokum Allah artinya adalah jika perselisihan itu menyebabkan perdebatan dan pertikaian maka kita harus mencari jalan tengahnya. Jika dikaitkan dengan masalah politik, perselisihan harus dikembalikan kepada hokum manusia; tetapi jika belum selesai juga maka harus dikembalikan kepada hokum Allah. Ayat yang berbunyi. “Sesungguhnya manusia itu bersaudara” maka artinya adalah bahwa persaudaraan itu memang sangat penting dan berkaitan dengan factor keimanan. Perselisihan yang terjadi sesama umat Islam harus didamaikan dengan memperkuat ikatan persaudaraan dan rasa tawakkal kepada Allah. Dalam tataran di Indonesia, ayat yang berbunyi “sesungguhnya Allah memerintah kepada perbuatan adil dan kebaikan (ihsan)” maka kaitannya dikarenakan Indonesia adalah Negara hokum yang

mempunyai konstitusi dan UUD. Jadi amar makruf nahi munkar adalah kekhususan dan keistimewaan umat Islam yang diberikan Allah demi kemuliaan Islam itu sendiri.

Dalam wawancara dengan santri yang berasal dari pondok pesantren Al-Riyadh Palembang yang bernama **Aris Firmansyah** (19<sup>th</sup>), menurutnya politik adalah suatu urusan atau tindakan mengenai ketatanegaraan seperti system pemerintahan, kebijakan atau siasat. Antara politik dan kekuasaan memang saling berkaitan tapi memiliki makna yang berbeda. Politik digunakan untuk mendapatkan kekuasaan; dan kekuasaan adalah apresiasi dari politik itu sendiri. Diakui bahwa memang dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah politik.

Ketika ditanya tentang masalah arti dari kata imam, khalifah atau ulil amri; apakah semua kata itu berarti “pemimpin”, maka dijawab oleh Aris dengan mengatakan bahwa arti kata itu adalah memang pemimpin. Bahkan dapat disebut juga dengan presiden. Hanya saja istilah khalifah atau ulul amri lebih dikenal pada masa setelah Rasul wafat. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Artinya adalah manusia sebagai pemakmur, pengatur dan pengelola system kehidupan di dunia karena manusia memiliki akal dan intuisi. Gelar khalifah juga dapat disamakan dengan kata pemimpin yang diberikan untuk penerus Rasul dalam kepemimpinan bagi umat Islam. Karena itu, umat Islam saat ini memang sangat memerlukan adanya khalifah untuk memimpin umat Islam ke dalam syariat ajaran yang telah Allah tentukan.

Dalam pandangan Aris, ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa 59, adalah bahwa kita wajib taat kepada semua demi mewujudkan nilai-nilai ketakwaan. Khusus kepada ulil amri, menurut Aris adalah mereka yang disebut sebagai pengikut Rasulullah. Ulil

amri ini dapat disebut juga dengan presiden atau pemerintah. Ketaatan kepada ulil amri harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Tetapi jika ulil amri sendiri tidak takut kepada Allah, maka ketaatan kepada ulil amri tidak bersifat mutlak. Jika ulil amri itu adalah presiden, maka ketaatan kepada presiden juga tergantung dengan al-Quran dan sunnah Nabi. Dalam pandangan Aris, ayat ini dapat menjadi dasar bahwa membentuk kepemimpinan itu adalah suatu hal yang wajib demi mewujudkan kemaslahatan umat.

Ketika ditanya tentang QS. Al-Maidah ayat 52, Aris menyebutkan bahwa Allah melarang hambanya yang beriman untuk loyal kepada orang yahudi dan nasrani karena mereka sebenarnya adalah musuh umat Islam. Menjadikan mereka sebagai pemimpin (auliya) selain merupakan suatu hal yang telah dilarang Allah juga dikarenakan Indonesia adalah Negara yang penduduknya mayoritas Islam.

Salah satu tema dalam politik adalah musyawarah, yang menurut Aris, bahwa dalam QS. Ali Imron ayat 159, perintah bermusyawarah dalam urusan artinya adalah bahwa sebelum mengambil suatu keputusan maka harus dilakukan musyawarah dulu. Antara musyawarah dan demokrasi memang saling berkaitan. Musyawarah menghasilkan mufakat; dan demokrasi menghasilkan keputusan yang menjadi ketetapan, misalnya dalam memilih pemimpin. Musyawarah juga dapat diartikan dengan kebebasan berpendapat, terutama dalam fungsi menyelesaikan masalah secara bijaksana.

Pada ayat yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, difahami sebagai perintah dari Allah bahwa setiap muslim harus memelihara keadilan atau berlaku adil kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang menjadi musuh kita. Keadilan yang menjadi ciri suatu Negara adalah jika Negara



mampu mengayomi kebutuhan rakyat serta memberikan rasa aman kepada mereka.

Dikaitkan dengan perselisihan yang terjadi di antara manusia, khususnya karena persoalan politik, Aris meyakini bahwa jika belum menemukan jalan keluar dari persoalan tersebut maka harus kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul. Hal ini menjadi dasar adanya anggapan bahwa setiap orang Islam itu adalah saudara (QS. al-hujurat; ayat 10).

Pada ayat yang mengajak manusia menjalankan keadilan dan kabajikan, dan mencegah pada perbuatan keji dan munkar, ayat in dapat dipakai dalam konsep Negara dengan cara membuat kebijakan dan peraturan yang dapat membuat rakyat menjadi sejahtera dan Negara menjadi aman.

## **B. Kategorisasi Ayat Politik dalam Wacana Kiayi-Santri**

Deskripsi pada sub bab ini akan diarahkan untuk memahami secara analisis bagaimana aspek yang terdapat dalam wacana tafsir kiayi-santri terutama dari ayat-ayat al-quran yang berbicara tentang politik. Diawali dengan deskripsi tentang arti politik yang difahami oleh para kiayi-santri, bagian ini ingin melihat lebih dalam wacana kiayi-santri tentang politik itu sendiri. Selain itu, deskripsi tentang konsep kepemimpinan, terutama yang diwakili melalui kata imam, khalifah atau ulil amri juga akan dinarasikan. Selanjutnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan politik secara umum; seperti tentang pemimpin dari non muslim, masalah keadilan, musyawarah dan sebagainya, akan diuraikan pada sub bab ini dengan satu tujuan yaitu ingin melihat lebih jauh bagaimana wacana para kiayi-santri itu dapat dianalisis secara komprehensif.

## **1. Hakikat Politik**

Wacana para kiayi-santri tentang arti politik memang terlihat sangat praktis. Mereka mengartikan politik tidak lebih dari kata “kekuasaan” atau sistem pemerintahan. Sekalipun ada diantara kiayi-santri yang menganggap politik sebagai cara atau ilmu untuk mengatur masyarakat; tetapi wacana politik bagi mereka selalu diakhiri dengan kata kekuasaan atau system pemerintahan. Artinya, hakikat politik dalam pandangan mereka tidak berasal dari substansinya yaitu mengatur masyarakat, tetapi dari realitas politik yang terjadi secara global. Deskripsi ini setidaknya menunjukkan bahwa di kalangan kiayi-santri, politik difahami bukan dari hakikatnya yaitu cara mengatur masyarakat, tetapi dari realitas yang berkaitan dengan kekuasaan.

Tetapi ketika ditanya apakah politik sama dengan kekuasaan, wacana kiayi-santri menunjukkan dua hal yang berbeda. Ada yang beranggapan sama; ada juga yang beranggapan tidak sama. Yang beranggapan bahwa politik sama dengan kekuasaan didasari dari realitas bahwa tujuan akhir dari politik adalah kekuasaan. Tetapi yang beranggapan bahwa politik tidak sama dengan kekuasaan melihat bahwa justru dalam kekuasaan-lah terdapat kewenangan untuk mengatur. Atau sederhananya dalam kekuasaan terdapat politik; tetapi dalam politik tidak terdapat kekuasaan.

Hal inilah yang mendasari penilaian bahwa dalam wacana tentang hakikat politik, kiayi-santri memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda. Kita juga bisa beranggapan bahwa hakikat politik yang ada dalam pemahaman kiayi-santri, dan mengarah kepada pemahaman yang realistis-praktis, muncul karena ketidaktahuan mereka tentang substansi makna kata “politik” itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa diantara

kiayi-santri, tidak ada satupun yang mendasari defenisi tentang politiknya dari sudut bahasa.

Sekalipun demikian, baik kiayi atau santri, semuanya bersepakat bahwa di dalam AL-Quran memang terdapat ayat-ayat tentang politik. Misalnya tentang ayat-ayat musyawarah atau kepemimpinan yang terdapat di dalam al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka tidak melengkapi pemahaman mereka tentang arti politik dari sudut bahasa, tetapi bahwa ada masalah politik dalam Islam, mereka akui bersama.

## **2. Masalah Pemimpin dan Kepemimpinan**

Masalah penting yang perlu dilihat kaktegorinya dalam wacana politik kiayi-santri adalah tentang kepemimpinan. Masalah ini ditanyakan melalui penggunaan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep imam, khalifah, ulil amri dan wali atau auliya; baik tentang makna katanya atau penggunaannya dalam al-Quran, ditanyakan kepada para kiayi-santri untuk mendapatkan wacana politiknya dalam konteks ke-Indonesiaan.

Dari persoalan yang ditanyakan kepada kiayi-santri tentang arti “pemimpin” dalam kata imam, khalifah atau ulil amri; hampir semua kiayi-santri menjawabnya dengan mengatakan bahwa kata-kata tersebut memang dapat diterjemahkan menjadi pemimpin. Tetapi ketika ditanyakan apakah arti pemimpin itu bisa disebut juga “presiden”; maka jawaban yang disampaikan terbagi menjadi dua bagian; (1) ada yang sepakat menyamakannya dengan kata presiden; dan (2) ada yang tidak sepakat menyamakannya dengan kata presiden.

Kesamaan kata imam, khalifah atau ulil amri dengan kata presiden, menurut wacana kiayi santri lebih disebabkan karena persoalan bahasa.

Yaitu bahwa kata pemimpin pada zaman dahulu—setidaknya di negeri Arab—tempat asal kata tersebut, memang disebut dengan imam, khalifah atau ulil amri. Pada konteks ke-Indonesiaan, setidaknya pada konteks demokrasi modern, istilah *imam*, *khalifah* atau *ulil amri* yang disamakan penyebutannya dengan kata “presiden”, didasari karena secara substansi adalah sama; yaitu pemimpin.

Pembedaan kata imam, khalifah atau ulil amri yang berarti “pemimpin” dalam arti “presiden”, muncul dalam anggapan kiayi-santri karena konteksnya yang berbeda. Bahwa istilah presiden memiliki konteks demokrasi modern; yang tidak sama dengan arti imam atau khalifah yang lebih bersifat teologis. Penggunaan kata “ulil amri” dalam konteks presiden lebih dipilih karena bersifat umum dan global; jadi bisa saja ulil amri adalah presiden. Apalagi kata imam atau khalifah yang muncul pada masa Rasul, mengandung arti bahwa kepemimpinan umat Islam yang berdasarkan al-Quran ini tidak sama maksudnya dengan kata presiden yang lebih berkonotasi modern dan kenegaraan saja.

Dari persoalan ini kita bisa melihat bahwa pemahaman para kiayi-santri tentang arti kata pemimpin, yang dalam al-Quran dipakai kata imam, khalifah atau ulil amri; menampilkan adanya pembedaan makna kata secara kontekstual. Bila diartikan dengan pemimpin umat, kata imam, khalifah atau ulil amri dapat diterima maknanya sebagai “pemimpin”; tetapi bila diartikan dengan pemimpin Negara, maka kata imam, khalifah atau ulil amri dapat diartikan dengan presiden. Kontekstualisasi kata-kata yang disebut oleh al-Quran seperti ini setidaknya memperlihatkan bahwa—dugaan sementara kita—pemahaman kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik, atau terhadap istilah

yang berkaitan dengan politik—selalu berkaitan dengan realitas politik yang terjadi pada masanya.

### **3. QS. Al-Maidah ayat 52 dan Pemimpin Non-Muslim**

Wacana kiayi-santri tentang QS. Al-Maidah ayat 52 terkait larangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *wali*, menunjukkan bahwa hampir semua kiayi-santri mengartikan “*awliya*” sebagai pemimpin. Ayat ini juga difahami bahwa hukumnya adalah haram karena dapat merusak akidah. Oleh karena itu, menurut kiayi-santri, orang muslim harus menjadi pemimpin, khususnya sebagai pemimpin Negara dan masyarakat.

Kriteria *wali* atau *auliya* (yang diterjemahkan sebagai “kawan” atau “pemimpin”) dari kalangan non-muslim, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 52, menarik untuk dikaji. Pertanyaan ini diajukan terkait realitas politik di Indonesia yang cukup memanas pasca terpilihnya Ahok sebagai gubernur Jakarta. Keterlibatan ulama yang melembaga dalam gerakan 212 dan munculnya kriteria calon pemimpin muslim dan non-muslim, selalu dialasi dengan QS. Al-Maidah ayat 52.

Dari hasil wawancara, kita melihat bahwa mayoritas kiayi-santri menolak seorang calon pemimpin yang berasal dari kalangan non-muslim. Setidaknya ada dua alasan pokok dari mereka yaitu; (1) karena mereka memang berbeda dalam keyakinan beragama; dan (2) karena di Indonesia Islam adalah agama mayoritas. Dari dua alasan ini, wacana tafsir kiayi-santri tentang QS. Al-Maidah ayat 52 menunjukkan bahwa prinsip keyakinan atau akidah adalah pertimbangan utama kiayi-santri; terlebih bahwa dari prinsip ini memunculkan alasan-alasan lain. Misalnya, bahwa memang al-Quran mengatakan demikian; atau karena

adanya kekhawatiran non-muslim akan mempengaruhi dan merubah keimanan orang muslim. Kekhawatiran ini tentu saja bersifat historis; dalam arti lebih dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis. Sekalipun ada diantara mereka yang membolehkan non-muslim sebagai pemimpin dengan syarat jika tidak ada muslim yang mampu.

Karena itulah ketika ditanya apakah dengan memilih non-muslim sebagai pemimpin bisa menjadikan seseorang bagian dari mereka; maka ada beberapa kiayi-santri yang berbeda pendapat. Sebagian besar memang menerima anggapan tersebut, tetapi ada juga yang tidak menerima dengan alasan realistis; bahwa belum tentu orang Islam yang memilih non-muslim sebagai pemimpin akan menjadi bagian dari mereka.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa persoalan kriteria pemimpin Negara, baik karena calon pemimpin itu dari kalangan muslim atau non-muslim, tidak dilihat dari aspek kualitas atau profesionalitas mereka, tetapi dari aspek teologis dan ajaran normative. Pendek kata, kriteria kiayi-santri tentang siapa pemimpin di Indonesia pada saat ini memang ditentukan melalui factor agama bukan kinerja.

#### **4. Musyawarah dan Bebas Berpendapat**

Pertanyaan tentang musyawarah diajukan untuk melihat wacana kiayi-santri tentang ayat al-Quran surat Ali Imron ayat 159 yang berbunyi, *“Dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam suatu urusan...”*. Untuk memahami wacana kiayi-santri tentang ayat ini, penulis juga bertanya tentang kesamaan konsep musyawarah dengan demokrasi dalam arti bebas berpendapat.

Hampi semua kiayi-santri sepakat bahwa musyawarah artinya adalah berunding atau berdiskusi demi mencapai kesepakatan bersama. Wacana ini jelas terlihat dari penggunaan kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia dan dipakai dalam kehidupan masyarakat. Penekanan musyawarah sebagai arti diskusi mendapat penekanan etika bahwa ia harus dilakukan dengan hati yang lembut. Karena itu, ketika dihubungkan arti musyawarah dengan bebas berpendapat, wacana kiayi-santri juga melihat bahwa bebas berpendapat juga perlu dilakukan dengan tidak menjatuhkan lawan bicara. Hal ini mengindikasikan bahwa para kiayi-santri lebih melihat musyawarah sebagai aspek komunikasi.

Ketika dikaitkan dengan arti demokrasi, wacana tentang arti musyawarah tidak selalu sama. Ada sebagian kiayi-santri yang menyamakannya dengan demokrasi, dan sebagian justru menganggapnya berbeda dengan demokrasi. Mereka yang berbeda, melihat bahwa arti demokrasi mengarah kepada bentuk dan sistem pemerintahan. Anggapan ini jelas menunjukkan bahwa wacana kiayi-santri tentang arti demokrasi selalu berhubungan dengan politik, dalam arti sistem pemerintahan; yang tidak sama dengan konsep musyawarah.

## **5. Negara yang Adil**

Masalah penting yang muncul dalam wacana kiayi-santri tentang ayat-ayat politik dalam al-Quran adalah ciri-ciri negara yang adil. Wacana ini ditanyakan berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, *“Berbuatlah adil; karena ia lebih dekat kepada ketakwaan”*. Dalam wacana ini, interpretasi kiayi-santri tentang ciri Negara adil memiliki kesamaan satu sama lain; sekalipun diungkapkan dalam kalimat yang berbeda.

Negara yang adil dalam wacana kiayi-santri, terlihat dari dua hal pokok yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dua hal ini mendominasi wacana tafsir kiayi-santri yang dikaitkan dengan masalah keadilan Negara. Dari tema ini kita bisa menduga bahwa wacana kiyai-santri yang lebih melihat ciri Negara yang adil itu pada perlindungan HAM dan kesejahteraan rakyat, merupakan tema yang muncul sejak beberapa tahun ini di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilres) tahun 2019. Sebagaimana diketahui, isu pemerintah zalim dalam bentuk kriminalisasi ulama; dan isu ketimpangan ekonomi rakyat akibat dominasi asing dan asing, menjadi isu politik yang panas dan menyebar ke masyarakat luas. Sedangkan wacana lain yang muncul berkisar pada masalah gender, perlunya penerapan ajaran Islam dan keharusan pemerintah berpihak kepada rakyat, menjadi ciri Negara yang adil yang diharapkan oleh kiayi-santri.

Dari ciri-ciri Negara yang adil ini, setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita; *pertama*, wacana kiayi-santri ini lebih bersifat idealis; dalam arti sesuai dengan tujuan umum pembentukan Negara; *kedua*, wacana kiayi-santri ini juga menggambarkan bagaimana kondisi objektif persoalan Negara tentang masalah HAM dan kesejahteraan rakyat.

## **6. Perselisihan Umat**

Wacana perselisihan umat yang ada dalam ayat-ayat al-Quran menarik untuk dicermati dalam interpretasi kiayi-santri. Dalam wacana ini, para kiayi-santri memberikan interpretasi mereka terhadap ayat yang mengatakan, “*Dan apa yang kalian perbedakan di dalamnya tentang*



*sesuatu maka hukumnya kembali kepada Allah*". Bagi kiayi-santri, kembali kepada Allah diartikan dengan cara merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Bahkan kembali kepada Allah juga dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah dan mencari jalan tengah dari setiap perselisihan. Pada sisi ini, kiayi-santri melihat hubungan antara al-Quran sebagai kitab hokum dan masalah yang muncul dalam realitas masyarakat. Dengan menerima al-Quran dan hadis sebagai pedoman hokum, maka itulah yang menjadi inti dari ayat tersebut.

Perselisihan dalam masyarakat, khususnya tentang masalah politik, setidaknya juga dilihat kiayi-santri sama dengan masalah hokum lain. Bagi kiayi-santri, kembali kepada Allah jika ada masalah politik yang diperselisihkan, maka hal itu dapat dilakukan dengan cara merujuknya sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan hadis. Bagi sebagian kiayi-santri lain, jika hokum Negara dapat didahulukan daripada hokum agama, maka itu juga bisa diterima. Sebab tidak semua masalah politik harus diselesaikan dengan pendekatan agama.

Melihat kenyataan ini, kita bisa mengatakan bahwa memang hampir semua kiayi-santri melihat masalah politik yang terjadi dalam Negara kita, dari perspektif agama. Perselisihan politik, apapun bentuknya, akan dinilai berdasarkan norma-norma agama, sebagaimana dalam al-Quran dan hadis. Agama dengan demikian menjadi indicator untuk menentukan mana politik yang baik dan buruk. Jadi di sini, kita bisa menduga bahwa kiayi-santri yang banyak menggunakan agama sebagai factor dalam perselisihan politik adalah mereka yang sering disebut masuk dalam kriteria politik identitas.

Tetapi bukan saja perselisihan yang berada dalam wilayah politik yang menjadi focus bagi kiayi-santri. Ketika ditanya tentang perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat muslim, wacana tafsir kiayi-santri melihatnya dengan sangat beragam. Sebagian besar mencoba memberikan alternative untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat dengan cara seperti menciptakan keadilan dan kedamaian, musyawarah mencari jalan tengah, mempertahankan solidaritas dan partisipasi masyarakat dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam wacana tafsir kiayi-santri, norma-norma agama dapat digunakan secara praktis untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi masyarakat.

## **7. Peran Negara dalam Perselisihan di Masyarakat**

Wacana penting yang berkaitan dengan perselisihan di masyarakat adalah tentang peran Negara. Wacana ini dimunculkan terkait pemahaman kiayi-santri tentang perselisihan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang disinggung oleh al-Quran dalam berbagai ayat tentang perselisihan. Sekalipun al-Quran secara lugas mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi bagaimana Negara berperan dalam perselisihan itu sangat perlu digali dari wacana tafsir kiayi-santri.

Wacana umum kiayi-santri tentang peran Negara dalam perselisihan umat adalah berkaitan dengan aspek fungsi. Negara harus menjadi fasilitator yang mampu mendamaikan berbagai pihak yang sedang bertikai. Fasilitasi tersebut dalam wacana kiayi-santri dapat dilakukan dengan musyawarah atau penguatan kesadaran social. Bahkan, keterlibatan ulama sebagai fasilitator dapat saja dilakukan oleh Negara terutama karena kedudukan mereka sebagai pemuka agama. Sebagai

fasilitator, negara juga harus mampu menjadikan musyawarah sebagai alternative penting dalam menyelesaikan perselisihan, disamping menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku.

Deskripsi tentang fungsi Negara sebagai fasilitator bagi masyarakat memang menarik untuk dilihat sebagai wacana kiayi-santri. Negara dipandang mampu mendamaikan masyarakat karena melalui kekuasaannya pihak-pihak yang bertikai akan tunduk kepada hukum. Tetapi penerapan hukum ketika terjadi perselisihan, yang tidak diutamakan karena ulama-kiayi lebih mendahulukan aspek musyawarah; perlu dilihat sebagai salah satu factor kurangnya kepercayaan kiayi-santri terhadap fungsi Negara itu sendiri. Bahwa perselisihan harus dikembalikan kepada al-Quran-Hadis, dan pelibatan ulama dalam proses penyelesaiannya; menunjukkan bahwa wacana kiayi-santri masih bersifat normative dan tidak praktis.

## **8. Amar Ma'ruf Nahi Munkar**

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wacana tafsir bagi kiayi-santri dengan cara mengajak manusia kepada perbuatan baik. Dalam pandangan kiayi-santri, setiap muslim harus mampu menjadi penyeru yang baik; yang dapat merubah perilaku manusia ke arah perbuatan yang diridhoi Allah swt. Tetapi yang menarik, adalah ketika wacana tafsir kiayi-santri tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar* ini dihubungkan dengan posisi Negara. Bagi kiayi-santri, Negara harus mampu membuat kebijakan dan peraturan yang dapat mensejahterakan rakyat. Melalui konsep ini juga Negara dapat menciptakan rasa aman dan rasa keadilan kepada seluruh penduduk. Untuk mewujudkan ini, kiayi-santri melihat bahwa keberadaan pemimpin Negara yang berasal dari

kalangan muslim menjadi sangat diperlukan untuk menjamin konsep *amar ma'ruf nahi munkar* berjalan dengan baik. Di samping itu, yang paling penting bagi kiayi-santri, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dijalankan sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, harus diatur melalui nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan hadis Nabi. []

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini melihat bahwa wacana tafsir kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik yang ada dalam al-Quran difahami secara kontekstual khususnya jika dihubungkan dengan kondisi politik yang sedang terjadi di Indonesia. Kontekstualisasi ini terjadi dikarenakan kiayi-santri melihat politik sebagai cara untuk mencapai kekuasaan. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berbicara tentang masalah politik, seperti konsep kepemimpinan dan keadilan social; tidak difahami sebagai ayat yang mengandung pesan-pesan global, tetapi justru parsial.

Secara kategorisasi, wacana tafsir kiayi-santri tentang ayat-ayat politik juga dibicarakan secara normative; dalam arti harus selalu berlandaskan apa yang sudah ada dalam al-Quran dan Hadis. Dari kriteria pemimpin non-muslim, keadilan social sampai masalah hokum, semuanya selalu dikembalikan kepada al-Quran dan Hadis. Hal ini disebabkan karena santri-kiayi melihat politik merupakan lawan dari agama; yang dari agama itulah nanti akan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

#### **B. Saran**

Penelitian ini akan sangat baik jika dilakukan dalam skala yang lebih luas, baik secara regional di provinsi Sumatera Selatan, atau secara nasional. Karena penelitian ini akan mampu memperlihatkan narasi yang berbeda dari kalangan kiayi-santri tentang masalah politik; *plus* memiliki karaktersitik yang berbeda; misalnya Kiayi-santri di pulau Sumatera atau di Jawa. Karena itu, sebagai saran kepada semua pihak yang terkait langsung atau tidak

langsung dengan penelitian ini, wacana tafsir kiayi-santri dapat saja dirubah menjadi wacana lain; misalnya tentang ekonomi kerakyatan atau social kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Hamka, *Tafsir al-Azhar* vol. 3 hal. 32.

Muhammad Saed Abdurrahman; *Tafsir Ibn Katsir Part 6 of 30* (al-Nisa 148 to al-Maidah 081), h. 140.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Mizan: Bandung, 1996), hal: 416

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (LKIS, Yogyakarta. cet I 1994), hal. 209-210

<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>. Diakses tanggal 23 Juli 2017.

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Ar-Risalah, 2006), jilid 6, hal. 424

Lihat : Muhammad Rahmatullah, “Kepemimpinan Khalifah Abubakar al-Shiddiq”, dalam *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, vol. 4 No. 2 September 2014, hal. 197-204.

Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Pascasarjana 2017,

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2013), h. 299

Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (Sage Publication, Inc. London, 1984)

Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali, hal. 6.

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (LKIS, Yogyakarta. cet I 1994), hal. 209-210

Muhammad Fuad Abd al-baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim*, (Kairo, Dar al-Hadis, 1996), hal. 99.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah; Mujamma' Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thaba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1412H).

Al-Thabari, *Jamiul Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran* (Beirut, Dar al-Fikr, 1988) juz. 8, hal. 496-501.

Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim* (Riyadh, Dar al-'Alam al-Kutub, 2004), jilid 4, hal. 59.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>. Diakses tanggal 16 Septmber 2019.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>. Diakses tanggal 16 Septmber 2019.



<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>. Diakses tanggal 16 September 2019.

Muhammad Abid al-Jabiri, Syura, terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta, Lkis, 2003) h. 26.

Ali Nurdin, Quranic Society (PT. Gelora Aksara Pratama, 2006) hal. 226.

Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Quran* (cet. 1, Jakarta, Pramadina, 1996) h. 440.

Abdullah al-Dumaji, Imamah ‘ Uzhma, terj. Umar Mujtahid (Jakarta, Ummul Qura, 2016) h. 482-483.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta, Prenada Media, 2014) h. 218.

<https://www.liputan6.com/news/read/3322122/mengulik-kembali-perjalanan-kasus-ahok>; diakses tanggal 25 September 2019 pukul 22.26. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/12/00032891/kasus.hukum.ahok.dinilai.sebagai.bentuk.politisasi.identitas.>; diakses tanggal 25 September 2019, pukul 22. 47.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180924195859-32-332825/anti-pemimpin-nonmuslim-meningkat-usai-kasus-ahok>; diakses tanggal 2 Oktober 2019.

<http://www.muslimoderat.net/2017/03/gus-ishom-konteks-al-maidah-51-adalah-peperangan-kh-maruf-amin-ayat-perang-tak-relevan-di-indonesia.html>; diakses tanggal 7 Oktober 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3459701/rais-syuriah-nu-jelaskan-soal-makna-al-maidah-51>; diakses tanggal 7 Oktober 2019

<https://www.indonesiana.id/read/107749/al-maidah-51-mui-vs-buya-syafii-maarif>; diakses tanggal 7 Oktober 2019.

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/23/ini-isi-puisi-lengkap-neno-warisman-di-malam-munajat-212-yang-dinilai-kampanye-terselubung?page=4>. Diakses tanggal 11 Oktober 2019.

<https://tirto.id/puisi-doa-neno-warisman-politis-mengancam-dan-menghakimi-lawan-dhDz>

<https://news.detik.com/berita/d-4451264/puisi-munajat-212-dan-doa-kesukaan-neno-warisman>

<https://www.liputan6.com/pilpres/read/3902817/maruf-amin-doa-neno-warisman-di-munajat-212-tidak-manjur>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/00005431/setara-institute-politisasi-agama-dalam-pilkada-2018-lewat-rekayasa-fakta>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/00005431/setara-institute-politisasi-agama-dalam-pilkada-2018-lewat-rekayasa-fakta>

## DAFTAR INDEKS

Aditya, 68, 69, 70, 71

Agil Siraj, 21

Ahok 1,51,52,53,54

Al-Maidah, 24, 53,60,

Amin Rais, 2

Arab, 2, 30, 66, 91

Auliya, 2, 61, 63, 67, 69, 76, 83, 92

Buya Syafii, 54, 58

Demokrasi, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 85, 91, 94,

Doa, 54, 55, 58,

Gender, 70, 77, 86,95

Hanbali, 4, 22

Ibn Kasir, 24,

Ibn Taimiyah, 70, 76

Ilham Akbar, 73,74,75

Imam Muttaqin, 71, 72, 73

Imam, 68, 69, 71,72,73

Ishomuddin, 21, 53

Kafir, 26, 42, 58, 60, 65, 67, 69, 72, 79

Keadilan, 6,8, 21, 31,32,36,61, 70

Khalifah, 68, 69, 71,

Kiayi 1,2, 7,8,13,14,21,61,62,89,90,91

Masjid, 59, 60,

MUI, 52,53,54

Musyawaharah, 6, 22, 27, 28, 29, 61, 63, 69

Nasrani, 67

Negara, 5, 73, 21,36,54, 62,66,68,70,73,74,

Neno Warisman, 54, 55, 58

Non muslim, 53, 65, 70, 73, 76, 83,

Pemimpin, 68,69,70,71,72,73,74,75

Politik, 4, 5,6,7,13, 14,18,20,21, 22,51, 52,59,61, 64,65,71,

Rizieq, 54

Rubath, 81,

Santri, 1,2, 7,8,13,14,21,61,62,89,90,91 Sa

Sofiani, Ust, 65,66

Sumatera Selatan, 100

Ulil Amri, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 78, 80, 82,  
83, 85, 91, 95.

Yahudi, 92

## GLOSARIUM

### **Al-Maidah ayat 52;**

Ayat al-Quran yang melarang orang mukmin menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali/auliya; yang diterjemahkan menjadi kawan atau pemimpin

### **Musyawarah;**

berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti [berunding](#), urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan [modern](#) tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap [rendah hati](#) untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan

keduniawian.

### **Auliya**

Dari kata wali; yang artinya orang dekat. Kata *wali* sering ditambahkan menjadi waliyul amri artinya yang memegang urusan. Sering diterjemahkan menjadi pemimpin.

### **Kafir**

Kata yang mengandung makna penolakan terhadap ajaran Islam. Orang kafir artinya orang yang menolak ajaran Islam.

### **Yahudi;**

Bangsa yang disebut dalam al-Quran sebagai umat nabi Musa; berdiam di kota Madinah pada masa Nabi dan sering melakukan permusuhan kepada Nabi Muhammad.

### **Imam;**

adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Jabatan atau kedudukan mereka disebut **imamat**,

### **Mukmin;**

Lawan kafir. Orang mukmin adalah orang yang menerima ajaran Islam.

### **Khalifah;**

Orang yang memegang jabatan sebagai pengganti Nabi dalam mengurus masyarakat.

### **Khalifah fil Ardhi;**

Orang yang memegang jabatan sebagai penerima amanat Tuhan.

### **Mukmin/Mu'min;**

adalah istilah [Islam](#) dalam [bahasa Arab](#) yang sering disebut dalam [Al-Qur'an](#), berarti "orang beriman", dan

istilah yang juga dapat digunakan secara kolektif.

merupakan seorang Muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah, dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa mu'min tidak serta-merta berarti "orang beriman" namun orang yang menyerahkan dirinya agar diatur dengan Din Islam. Selain itu, mu'min juga dapat dikatakan orang yang memberikan keamanan atas Muslim.

**Demokrasi;**

Istilah dari kata Yunani yang berarti pemerintahan berada di tangan rakyat.

**Politik;**

Ilmu/cara/seni dalam memerintah/mengurus masyarakat;

**Kiayi;**

**Kiai** atau **Kyai** bagi pemahaman Jawa

**Non-Muslim;**

Orang yang tidak masuk dalam kelompok masyarakat Islam

**Gender;**

Istilah untuk sifat/jenis manusia yang berarti perempuan

**Santri**

secara umum adalah sebutan



adalah sebutan untuk "yang dituakan ataupun dihormati" baik berupa orang, ataupun barang. Selain Kiai, bisa juga digunakan sebutan Nyai untuk yang perempuan. Kiai bisa digunakan untuk menyebut:

**Kiai** bagi masyarakat Banjar dan Kalimantan adalah [gelar](#) bagi kepala [distrik](#) (di Jawa disebut [wedana](#)), bukan ulama. Sedangkan untuk ulama disebut Tuan misalnya Tuan Guru, Tuan Penghulu, Tuan Khatib. Gelar ini berasal dari nama jabatan menteri pada [Kerajaan Banjar](#). Pemerintah [Hindia Belanda](#) lalu mengalihkan nama ini untuk nama [jabatan](#) kepala distrik untuk [wilayah Kalimantan](#). Contohnya ialah Kiai Masdhulhak, seorang kiai yang meninggal dalam pemberontakan Hariang, [Banua Lawas, Tabalong](#), tahun [1937](#).

### **Teokrasi;**

adalah [bentuk pemerintahan](#) dimana

bagi seseorang yang mengikuti [pendidikan](#) agama [Islam](#) di [pesantren](#), biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa [Sanskerta](#), "*shastri*" yang memiliki akar kata yang sama dengan kata [sastra](#) yang berarti [kitab suci](#), [agama](#) dan [pengetahuan](#). Ada pula yang mengatakan berasal dari kata *cantrik* yang berarti para pembantu [begawan](#) atau [resi](#). Seorang cantrik diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tidak jauh beda dengan seorang santri yang mengabdikan di pesantren, sebagai konsekuensinya ketua pondok pesantren memberikan [tunjangan](#) kepada santri tersebut.

**Negara** adalah sekumpulan orang yang menempati

prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama.

Kata "teokrasi" berasal dari [bahasa Yunani](#) θεοκρατία (*theokratia*). θεος (*theos*) artinya "[tuhan](#)" dan κρατειν (*kratein*) "memerintah". Teokrasi artinya "pemerintahan oleh wakil tuhan". Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip Ilahi.

Beberapa contoh negara yang berbentuk teokrasi adalah [Vatikan](#), [Tibet](#), dan [Republik Islam Iran](#).

wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.